



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS

1. Peningkatan produktivitas pertanian

Capaian sasaran dalam rangka Indikator Produktivitas Pertanian, yang didukung oleh lima subyek 5 (lima) Program, yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perikanan, Program Peningkatan dan Pengembangan Perikanan Perairan, Program Perikanan Usaha Perikanan, Program Peningkatan dan Pengembangan Budidaya Perikanan, dan Program Resiliensi Perikanan.

2. Peningkatan produktivitas perikanan

Capaian sasaran dalam rangka Indikator Produktivitas Perikanan yang didukung oleh lima subyek 5 (lima) Program, yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perikanan, dan Program Peningkatan Resiliensi Perikanan dan Kesehatan Masyarakat Perikanan.

3. Meningkatnya kemandirian pangan yang berkelanjutan

Capaian sasaran dalam rangka Indikator Star Tiga Pangan Nasional (STPN) Nasional yang didukung oleh lima subyek 5 (lima) Program, yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Inovasi Pangan Masyarakat, Program Pengembangan Kawasan Pangan dan Program Pengembangan Kawasan Perikanan.



https://www.dinaspertanian.kemendagri.go.id

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipaparkan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan RKJ Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan optimalisasi terhadap target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kapabilitas pencapaian semua strategi berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Dengan adanya penyajian RKJ ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkeadilan di masa mendatang.

Panghalang, 15 Januari 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN



YOHANI S.P., M.M.

011118.1990011.001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategi yang ingin dicapai dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas pertanian

- Capaian sasaran diukur melalui indikator produktivitas pertanian dengan target pertambahan sebesar **6,94 ton/ha** yang dibidang hortikultura total luas produksi komoditi pertanian dibidang luas tani.
- Capaian indikator tersebut didukung oleh lima program sebanyak 5 (lima) Program, yaitu: Program Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Pertanian, Program Perekonomian dan Pengembangan Kawasan Pertanian, Program Pertanian Usaha Pertanian, Program Pengabdian dan Pengembangan Kawasan Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian.
- Berdasarkan angka sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024, produktivitas pertanian yang diukur dari angka pertambahan komoditi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura mencapai angka **7,02 ton/ha**, dengan demikian capaian ini telah mencapai target yang diharapkan dengan pemertaan capaian terhadap target sebesar **101,45%**. Pemertaan pencapaian terhadap target mencapai **101,45%**. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target.
- Dibandingkan capaian target produktivitas pertanian tahun 2023 sebesar **6,70 ton/ha**, terjadi peningkatan sebesar **4,70%**.

2. Peningkatan populasi peternakan

- Capaian sasaran diukur melalui indikator produksi peternakan



dengan target sebesar **29.303,89** Ton yang dituang melalui jumlah Produksi ternak yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Nilai waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja ini adalah 1 (satu) tahun.

- Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yaitu: Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- Beribaskan angka rata-rata Satuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Produksi peternakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai angka **29.423,40** Ton atau sebesar **102,10%** dari target yang ditetapkan. Dengan demikian capaian ini telah melebihi target.
- Dibandingkan capaian produksi peternakan tahun 2023 sebesar **28.854,03** Ton terjadi peningkatan sebesar **6,80%**.

1. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam.

- Capaian sasaran dalam bidang indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi dengan target pencapaian angka **89,09**. Skor PPH konsumsi merupakan nilai yang didasarkan pada kandungan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang Sederakapangan konsumsi pangan dimasyarakat dengan perhitungan (R-1).
- Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja sebanyak 3 (Tiga) Program, yaitu: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.
- Beribaskan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung skor PPH konsumsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mencapai angka **90,3** atau persentase realisasi sebesar **101,36%**.

terhadap pencapaian target. Dengan demikian capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan.

- Dibandingkan capaian target skor IPH Eksternal tahun 2023 sebesar 87,9 terdapat peningkatan sebesar 3,21%.

4. Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (OPD).

- Capaian sebagian diukur melalui indikator nilai Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah dengan target angka penilaian dalam EENSTRAS sebesar 81,24. Nilai RB merupakan angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- Capaian indikator tersebut didukung oleh kriteria subawak 1 (satu) Program, yaitu Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator tidak dapat dilakukan.
- Nilai RB Perangkat Daerah tahun 2024 tidak diketahui karena adanya perubahan peraturan dan pusat, sehingga tidak lagi diberikan penilaian oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini diwujudkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan

Kejadian Deras Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 1884/020/Kpts/Ditp-1 Terneng Indikator Kinerja Utama (IKU) Deras Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2026, bahwa indikator kinerja utama (IKU) sasaran ini dilampai.

- Persentase ketercapaian terhadap target tahun 2024 terhadap capaian indikator Nilai SB Peringkat Daerah tahun 2023 **tidak dapat diperbandingkan**.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian khusus oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan langkah strategis sebagai tidak lanjut pengendalian dari risiko yang timbul dalam proses pelaksanaan kegiatan. Adapun tantangan yang teridentifikasi dalam pencapaian target kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

1. Pemerataan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan lahan non pertanian;
2. Semakin menurunnya jumlah Swadaya Masyarakat (SDM) dan minat generasi muda untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian;
3. Terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlu dukungan insentif;
4. Banyaknya petani yang beralih profesi menjadi penambang sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan;
5. Banyak perusakan lahan gambut dan perubahan pola intensitas cara tanam yang menyebabkan masa ekstras;
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat, bergizi, dan bergaya;
7. Kenaikan harga pangan yang disertai penurunan daya beli masyarakat.



Salah evaluasi yang ditunjukkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai plakan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DIRINAR EKSEKUTIF	ii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xi
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Gambaran Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Pola Jabatan	4
1.3. Sisa-sisa Strategi	10
1.4. Dukungan SIM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	14
BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	24
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	24
2.2. Strategi dan Aksi Eksternal	25
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	26
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	35
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	36
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	36
3.2. Efisiensi Anggaran	72
3.3. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAMKP Tahun 2024	74
3.4. Inovasi	75
3.5. Penghargaan	79
3.6. Greening	81
BAB IV. Penutup	82
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Analisis Fungsional Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kabinis dan Kompetensi.....	19
Tabel I.2.	Struktur Organisasi.....	22
Tabel I.3.	Perencanaan Anggaran Tahun 2023-2024.....	23
Tabel II.1.	Susunan Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023-2026.....	25
Tabel II.2.	Strategi dan Aksi Kebijakan.....	25
Tabel II.3.	Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pelaksanaan Susunan Tahun 2024.....	25
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024.....	29
Tabel II.5.	Empusmen Anggaran Indik pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	29
Tabel II.6.	Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-I Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	31
Tabel II.7.	Empusmen Anggaran Indik pada Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-I Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	31
Tabel II.8.	Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-II Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	33
Tabel II.9.	Empusmen Anggaran Indik pada Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-II Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	33
Tabel III.1.	Skala Misi Perencanaan Kinerja.....	35

Tabel 01.2. Capaian Kinerja Tahun 2024	37
Tabel 01.3. Rencana Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 1)	39
Tabel 01.4. Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 1)	40
Tabel 01.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 (Sasaran 1)	40
Tabel 01.6. Rencana Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 2)	53
Tabel 01.7. Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 2)	53
Tabel 01.8. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 (Sasaran 2)	56
Tabel 01.9. Rencana Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 3)	60
Tabel 01.10. Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 3)	61
Tabel 01.11. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 (Sasaran 3)	64
Tabel 01.12. Rencana Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 4)	68
Tabel 01.13. Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 4)	69
Tabel 01.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024	73
Tabel 01.15. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SARIP Tahun 2024	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Cascading Charts, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	7
Gambar 1.2.	Tugas, Fungsi dan Pola Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	17
Gambar II.1.	Website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25
Gambar III.1.	Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Sasaran 1)	47
Gambar III.2.	Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Program Pertanian)	49
Gambar III.3.	Dokumentasi Program Perikanan (Sasaran Pertanian).....	50
Gambar III.4.	Dokumentasi Program Pengabdian dan Pengabdian Berbasis Pertanian).....	51
Gambar III.5.	Dokumentasi Program Penyediaan Pertanian.....	52
Gambar III.6.	Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Sasaran 2).....	57
Gambar III.7.	Dokumentasi Program Pengabdian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.....	58
Gambar III.8.	Dokumentasi Program Pengabdian Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.....	65
Gambar III.9.	Dokumentasi Program Pengabdian Kewajiban Warga	66
Gambar III.10.	Dokumentasi Program Pengabdian Kewajiban Warga.....	67
Gambar III.11.	Bagan Cascading Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	81



BAB I

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyajikan Perjanjian Kinerja, atau pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD/daerah APBD. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RBH Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi kinerja yang terukur kepada pemilih, mandai atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. Gambaran Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan berupa dokumen Rencana strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang



disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2025.

Hidangan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersebut dalam gambar berikut:

Gambar 3.1
Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

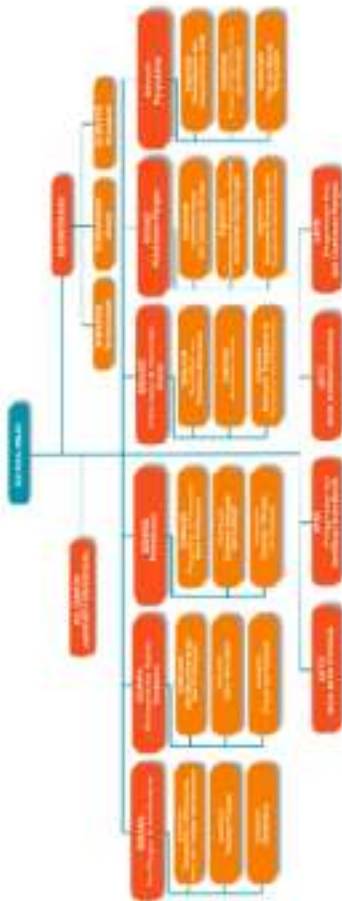


For Cascading Kinerja dapat dilihat melalui link : <https://cascading.kem.go.id>



For Peta Proses Bisnis lengkap dapat dilihat melalui link : <https://bpm.kem.go.id>

Temuan-temuan Gagasannya dan Perbaikan dan Kembangkan Fasilitas Persekolahan
Suplemen Kegiatan Belajar Tahun 1954



1.2. Tugas dan Fungsi, dan Petunjuk Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah diuraikan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang keseluruhan menjadi dasar penempatan personal dalam jabatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pemerintahan yang ditugaskan kepada Provinsi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pemerintahan kehutanan teknis di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kehutanan teknis di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
5. Penyelenggaraan kegiatan yang diberikan oleh atasan.

Secara umum uraian tugas dan fungsi dalam susunan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Bangka Belitung dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, merencanakan, melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi serta

melaunching tugas desentralisasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan monitoring pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. Penyelenggaraan inspeksi dan pengawasan bidang pertanian dan bidang pangan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
- g. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan tugas administratif, mengorganisir, mengkoordinasikan, menunjang, mendata, mengawalani, mengontrol dan menyelenggarakan administrasi badan meliputi perencanaan, urusan dan kepegawaian, keuangan serta administrasi Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dinas;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana bahan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang

- meliputi perencanaan, umun dan kepegawaian serta keuangan.
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian perencanaan;
 - e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, pembukuan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelayanan keuangannya;
 - f. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengurusan komisi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
 - g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi kelengkapan, keramahan, pengelolaan barang-barang, ketertarikan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi kepraktisan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsifan dinas;
 - h. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan perataan keberagaman dan ketatalaksanaan bahan serta UFTD;
 - i. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyajian bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lengkap dinas;
 - j. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyajian dan pengalihan bahan KENSTRA, KEMA, KKT, RKA, DPA, DPA, TAPRIN, LARIP, LEP dan UFTD lengkap dinas;
 - k. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengalihan bahan tidak lengkap laporan hasil pemeriksaan lengkap dinas;
 - l. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengalihan bahan rekomendasi dan penastanaan terhadap permasalahan dan masalah human keorganisasian dan kebid/kegiatan sosial di bidang pelayanan dan bidang pargat;
 - m. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengalihan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UFTD dan/atau Cabang Dinas;



- a. Penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertanggung
- ii. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN dan
- q. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinasikan, meninjau, mengawasi, memantau, memantau, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan bahan dan penyusunan rencana kebijakan teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kebijakan teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian perencanaan kebutuhan dan pengadaan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengawas, pefidara dan sertifikasi hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian bantuan teknis pemberian peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian bantuan teknis panen panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman

jangka dan berteknologi;

- i. Penyelenggaraan verifikasi konsep surat rekomendasi teknis atau usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura lintas daerah Kabupaten/Kota;
- ii. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi pelaksanaan;
- iii. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi ASN;
- iv. Penyelenggaraan bagi-lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mengpromosikan, memantau, mengawasi, meneliti, mengevaluasi dan melaksanakan pengujian, penyusutan, pemantauan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusutan lahan dan pemantauan rencana kehijauan teknis perkebunan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perkebunan, produksi, perdagangan, pengujian dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantauan kebutuhan dan penyediaan benih;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan sertifikasi hasil;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penelitian, pembinaan, penyusutan, peningkatan produktivitas;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim perkebunan;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanggulangan gangguan usaha dan pemupukan kebijakan perkebunan;



- i. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian bantuan kepada peternak, pedagang dan pemasok hasil perikanan;
- j. Penyelenggaraan verifikasi konsep surat rekomendasi teknis lain usaha perikanan lintas daerah Kabupaten/Wota;
- k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- m. Penyelenggaraan bagi lain yang diberikan wewenang.

5. Bidang Perikanan dan Kesehatan Hewan

Bidang Perikanan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan inspeksi, koordinasi, pengawasan, pembinaan, pengawasan, rencana, pelaksanaan dan mengendalikan kebijakan, persiapan, pemantauan dan penyusunan kebijakan dan peraturan lingkungan teknis di Bidang Perikanan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Perikanan dan Kesehatan Hewan;
- b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan bahan dan penyusunan rencana kebijakan teknis Perikanan dan Kesehatan Hewan;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis/bidang, produk, peraturan dan kesehatan hewan, perikanan serta pengolah dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan standar daya praktik hewan;
- e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemantauan ketahanan dan penyebaran bibit/babi ternak pakan ternak dan bibit/babi lainnya pakan ternak;
- f. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian bantuan kepada peternak perikanan produksi ternak;
- g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengendalian penyakit



hewan dan kesehatan masyarakat veteriner:

- b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi hasil/hasil ternak, pakan, hewan pakan ternak, dan obat hewan;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengawasan penanganan dan perdagangan hewan, dan produk hewan;
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian rekomendasi teknis peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian bantuan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- g. Penyelenggaraan penelitian, evaluasi dan pelaporan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

a. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas memverifikasi, mengontrol, mempromosikan, meninjau, mengawasi, menilai, mengawasi, dan mengendalikan pengujian, pengalihan, penanganan dan pemasaran selanjutnya di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyajian bahan dan penyusunan rencana selanjutnya teknis prasarana dan sarana pertanian;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian.
- e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian.
- f. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian bantuan pembinaan pertanian.
- g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian fasilitas insentif pertanian.
- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan:
 - i. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN.
 - j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas memverifikasi, mengorganisir, mempromosikan, memfasilitasi, mengorganisir, memfasilitasi, mengkoordinasi dan mengendalikannya pengujian, penyediaan, pemantauan dan penyusunan kebijakan di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan tugas:

- a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyajian lahan dan penyusunan rencana kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan;
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengembangan tana dan metode penyuluhan;
- e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengembangan teknologi

- e. Penyelenggaraan dan pengendalian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang ketersediaan, penyediaan ketahanan pangan dan kualitas penyediaan infrastruktur pangan, dan analisis daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Penyelenggaraan dan pengendalian penyediaan bahan dan penyusunan ransum kebijakan daerah di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- g. Penyelenggaraan dan pengendalian penyediaan bahan dan penyusunan ransum kebijakan harga ransum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- h. Penyelenggaraan dan pengendalian penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan:
 - i. Penyelenggaraan dan pengendalian penempatan program di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
 - j. Penyelenggaraan dan pengendalian penyediaan dan penyediaan pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - k. Penyelenggaraan dan pengendalian pengelolan cadangan pangan pemerintah Provinsi dan seraya ketersediaan cadangan pangan pemerintah Provinsi;
 - l. Penyelenggaraan dan pengendalian pengelolan data dan informasi pasokan dan harga pangan serta pengembalian pangan distribut
- m. Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- n. Penyelenggaraan dan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi pengawakanan konsumsi dan keamanan pangan, ketersediaan keamanan pangan, pengawasan

kegiatan penga, pengawas serta hasil pertanian (liris Kabupaten/Kota) kerjasama dan informasi kesehatan pangan;

- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan teknis dan pengawasan di bidang keamanan pangan, pangan lokal, promosi pengalihan pangan konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (liris Kabupaten/Kota), serta sara dan informasi keamanan pangan;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keamanan pangan, pangan lokal, promosi pengalihan pangan konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (liris Kabupaten/Kota), serta sara dan informasi keamanan pangan;
- c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, informasi dan edukasi pengalihan pangan konsumsi pangan;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

9. UPTD Balai Benih Pertanian

Balai Benih Pertanian melaksanakan seluruh tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang perbanyakan benih tanaman, pemanfaatan dan pengembangan teknologi benih dan bibit benih varietas unggul benih dasar (BD) dan benih pokok (BP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan administrasi sesuai di lingkungan UPTD. Dalam melaksanakan tugas, Balai Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang hasil dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang hasil dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang hasil dan produksi pertanian;
- d. Pengabdian ketertarikan dan;
- e. Pelaksanaan tugas kefarmasian lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Hasil

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Hasil mengawasi tugas melaksanakan seluruh tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam teknis operasional dan/atau angketan teknis penyusung tertentu di bidang pengawasan, penilaian mutu hasil dan sertifikasi mutu hasil pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Hasil dan Ribit menyelenggarakan tugas:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi hasil pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi hasil pertanian;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi hasil pertanian;
- d. Pengabdian ketertarikan dan;
- e. Pelaksanaan tugas kefarmasian lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. UPTD Balai Proteksi Tanaman

Balai Proteksi Tanaman melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penyusung tertentu di bidang perlindungan tanaman

meliputi pemetaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman dan serangga dampak frekuensi ilir, mengeluarkan rekomendasi pengendalian hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman serta pengawasan pestisida sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Proteksi Tanaman menyelenggarakan tugas:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pertanian;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pertanian;
- d. Pengelompokan ketentraman dan;
- e. Pelaksanaan tugas kelurahan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis pelayanan terpadu di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan meliputi pelayanan teknis, pengujian, sertifikasi, serta registrasi produk pangan segar hasil pertanian sesuai dengan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian. UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan tugas:

- a. Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan segar hasil pertanian;
- b. Pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian;
- c. Perencanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- d. Pembertan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;
- e. Penyelenggaraan urusan ketertarikan dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.3. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok jabatan fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- b. Memonitor dan melaksanakan teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- c. Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.2.

Struktur, Fungsi dan Deskripsi Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Percontohan Kabupaten Pangkajene Kepulauan



Sal: Foto jabatan Kelompok dapat dilihat melalui link: <http://klu.y/penjab-stansi/PNT>

1.3. **Isu-Isu Strategis**

Eksternal adalah masalah lingkungan sekitar mana instansi tersebut mampu menanggapi dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan", antara lain sebagai berikut:

1. PDBB (Produk Domestik Regional Bruto) sub sektor pertanian;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
3. Peningkatan mutu, daya saing produk dan nilai ekspor hasil pertanian;
4. Peningkatan aksesibilitas sumberdaya pertanian yang unggul dan berkelanjutan;
5. Peningkatan pola konsumsi dan kebiasaan pangan masyarakat.

1.4. **Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan ketersediaan sumberdaya perkhayanan yang memadai. Peningkatan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penunjang dinas, dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Subunit Head & Program Manager: Evaluation Rubric for Unit/Program
December 2014

ID	Description	COMMUNICATION					TEACHING & LEARNING					TOTAL SCORE	
		1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	Average
UNIT/PROGRAM EVALUATION		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Subunit / Program		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Communication	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	Communication & Teaching & Learning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



Berdasarkan data pada tabel 11, tingkat pendidikan SDN Dusun Fertan dan Kelurahan Paingan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 173 orang (53,59%), diikuti oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 55 orang (10,22%), D3 sebanyak 29 orang (8,99%), SMTA sebanyak 78 orang (24,12%), dan SLTP sebanyak 10 orang (3,10%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan, hal ini sesuai dengan struktur pos lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel 11.
Garis Peminatan

No	Nama Bidang Utama	Jumlah
1	TANAH	1.003.353 M ²
2	PERMULIAAN DAN HESAN <ul style="list-style-type: none"> a. Akar-akar Negeri b. Akar-akar Nelayan c. Akar-akar Ronggok (tan. Akar) Daur d. Akar-akar Perikanan/Perikananbudak e. Akar-akar Kambing dan Banteng Takaga f. Akar-akar Kuda dan Kerbau jawa g. Akar-akar Kambing h. Akar-akar Lahan Perikanan i. Akar-akar Perikanan 	2.674.188
3	CIKING DAN JANGKAM <ul style="list-style-type: none"> a. Mangrove Ceking b. Mangrove Jangkam 	28.180
4	JALAN, TERAKSI DAN JABANGAN <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan dan Jembatan b. Terakasi Air Teras c. Jembatan d. Terakasi 	25.180
5	AGRI TETAP LAINNYA <ul style="list-style-type: none"> a. Sida Perikananbudak b. Rintang Beryak Negeri/Kelurahan c. Rintang Terakasi dan Terakasi 	11.480.800
6	KONSTRUKSI DALAM PERKERJAAN	1.180

Sumber: Bidang Pemas. Dinas Perikanan dan Air Bersih dan Pantai, 2024

Kendaraan operasional Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan Eselon II, 17 unit kendaraan operasional jabatan Eselon II, dan 24 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruang kerja secara relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengolah hasil, ruang asup, ruang inspeksi, ruang box, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 70%. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Biaya rata-rata sebesar 70% dari komputer/laptop yang ada diprediksi dikawatirkan 200 hari awal yang aplikasinya sudah sudah tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

Tabel 3.2
Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Perubahan Tambahan	Perubahan Pengurangan	Jumlah
2023	Rp19.590.021.472	Rp17.982.127.288	-	-	Rp1.607.894.184
2024	Rp15.147.549.400	-	-	-	Rp15.147.549.400

Sumber: Tim Perencanaan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, 2023

Debuhan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel 3.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2023 terdapat penurunan Total anggaran belanja sebesar Rp17.952.993.451,- Hal ini menunjukkan ada kebuka anggaran untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II Berisi:

1. Tujuan, Isi, dan Misi
2. Misi dan Strategi
3. Struktur Organisasi
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Rencana Kerja Tahun 2023-2026
6. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Rencana (Rencana Strategis) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan perwujudan operasional EPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengkomunikasikan di antara kegiatan selama kurun waktu 2023-2026.

Rencana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sebagai rencana kinerja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjabarkan pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya produksi dan sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian. Terkait hal tersebut, tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah:

1. Meningkatnya Produksi Pertanian;
2. Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan lokal, sumber daya dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPRD).

Adapun serapan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 11

Rencana Anggaran Biaya Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023-2027

No	KELUARAN (KEMENDAG)	KODE KEMENDAG (KEMENDAG)	Kategori	Revisi 2023	TAKLAK 2023-2027					Total RAB 5-tahun	Cat
					2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Mengupayakan produktivitas pertanian	Program Kerja Pertanian	Sub/ke	A.7Y	641	638	729	730	730	-	
2.	Mengupayakan produktivitas perikanan	Program Perikanan	Sub	A.7Y.1	111111	111111	111111	111111	111111	-	
3.	Mengembangkan sumber daya manusia pertanian	Dev. Dns. Pangan (Kawasan 2000) Subkawasan	Sub	B.1.2	4444	4444	4444	4444	4444	-	
4.	Mengembangkan teknologi pertanian berbasis Digital (Kawasan 2000) Subkawasan	Dev. Dns. Pangan (Kawasan 2000) Subkawasan	Sub	B.1.2	4444	4444	4444	4444	4444	Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengabdian Masyarakat lainnya yang dilaksanakan oleh instansi lain.	

Sumber : Rencana Anggaran Biaya Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023-2027

2.2. Strategi dan Arak Kelengkapan

Strategi dan kelengkapan untuk mencapai target dan sasaran pangan merupakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 12
Strategi dan Arak Kelengkapan

KELUARAN	STRATEGI	AKSI DAN JANGKA
Peningkatan produktivitas pertanian	Mengupayakan produktivitas dan pengoptimalisasi sarana pertanian	Mengembangkan dan lakukan penelitian pertanian
	Mengupayakan produktivitas dan pengoptimalisasi prasarana pertanian	Mengembangkan dan melakukan pemeliharaan pertanian
Meningkatkan dan mengembangkan teknologi pertanian	Mengembangkan dan meningkatkan teknologi pertanian	Mengembangkan aplikasi dan lakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM)
	Mengembangkan dan melakukan penelitian pengabdian masyarakat	Mengembangkan aplikasi, penelitian, dan kolaborasi dengan instansi lain

Meningkatkan produktivitas peternak/peternak	Meningkatkan dan meningkatkan secara signifikan	Meningkatkan pertumbuhan angka produktivitas ternak
	Meningkatkan keahlian teknis dan keterampilan masyarakat peternak	Meningkatkan cara pemeliharaan ternak
Meningkatkan kesadaran peternak yang terampil	Meningkatkan keterampilan, etika dan sikap dan keterampilan peternak	Meningkatkan keterampilan (peternak secara umum)
	Meningkatkan pengetahuan peternak	Meningkatkan dan meningkatkan peternak
	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak secara umum	Meningkatkan dan meningkatkan peternak (peternak)
	Meningkatkan keterampilan keterampilan peternak	Meningkatkan dan meningkatkan peternak (peternak)
Meningkatkan Tercerahkan Literasi Peternak Daerah (TILPD)	Meningkatkan hasil belajar dan keterampilan peternak secara umum	Meningkatkan dan meningkatkan (TILPD)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Buletin Pertanian, 2023/2024

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur Program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran RKPD Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11.1
Struktur Program dan Kegiatan Tahun Langsung Penganggaran Daerah Tahun 2024

Program	Subprogram	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Estimasi Anggaran
2. Program dan Kegiatan langsung pemerintah	2.1. Ketahanan dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PANGGILAN DAN PENYALINGAN TERPADU (PPT)	Rp1.111.000.000	Rp1.111.750.000	11.111.000.000
		Program dan Kegiatan	Rp1.111.000.000	Rp1.111.750.000	11.111.000.000
		Program dan Kegiatan	Rp1.111.000.000	Rp1.111.750.000	11.111.000.000
		Program dan Kegiatan	Rp1.111.000.000	Rp1.111.750.000	11.111.000.000
		Program dan Kegiatan	Rp1.111.000.000	Rp1.111.750.000	11.111.000.000
		Program dan Kegiatan	Rp1.111.000.000	Rp1.111.750.000	11.111.000.000
		Program dan Kegiatan	Rp1.111.000.000	Rp1.111.750.000	11.111.000.000
		Program dan Kegiatan	Rp1.111.000.000	Rp1.111.750.000	11.111.000.000
		PROGRAM PENYALINGAN DAN PENYALINGAN TERPADU (PPT)	Rp1.111.000.000	Rp1.111.750.000	11.111.000.000
		Program dan Kegiatan	Rp1.111.000.000	Rp1.111.750.000	11.111.000.000
		PROGRAM PENYALINGAN DAN PENYALINGAN TERPADU (PPT)	Rp1.111.000.000	Rp1.111.750.000	11.111.000.000
		Program dan Kegiatan	Rp1.111.000.000	Rp1.111.750.000	11.111.000.000

1. Bidang/Unit Kerja Tipe Kegiatan Indikator Tipe dan Mencakup Mencakup (2023)	Rincian Kategori Kategori (2023)	INDIKATOR KINERJA KEMERJA PUSAT DAN KEMERJA DAERAH	KPI 2023/2024	KPI 2024/2025	2023/2024
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.1	KPI 1.1.1.1.2	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.3	KPI 1.1.1.1.4	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.5	KPI 1.1.1.1.6	0%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.7	KPI 1.1.1.1.8	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.9	KPI 1.1.1.1.10	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.11	KPI 1.1.1.1.12	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.13	KPI 1.1.1.1.14	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.15	KPI 1.1.1.1.16	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.17	KPI 1.1.1.1.18	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.19	KPI 1.1.1.1.20	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.21	KPI 1.1.1.1.22	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.23	KPI 1.1.1.1.24	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.25	KPI 1.1.1.1.26	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.27	KPI 1.1.1.1.28	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.29	KPI 1.1.1.1.30	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.31	KPI 1.1.1.1.32	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.33	KPI 1.1.1.1.34	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.35	KPI 1.1.1.1.36	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.37	KPI 1.1.1.1.38	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.39	KPI 1.1.1.1.40	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.41	KPI 1.1.1.1.42	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.43	KPI 1.1.1.1.44	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.45	KPI 1.1.1.1.46	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.47	KPI 1.1.1.1.48	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.49	KPI 1.1.1.1.50	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.51	KPI 1.1.1.1.52	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.53	KPI 1.1.1.1.54	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.55	KPI 1.1.1.1.56	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.57	KPI 1.1.1.1.58	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.59	KPI 1.1.1.1.60	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.61	KPI 1.1.1.1.62	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.63	KPI 1.1.1.1.64	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.65	KPI 1.1.1.1.66	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.67	KPI 1.1.1.1.68	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.69	KPI 1.1.1.1.70	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.71	KPI 1.1.1.1.72	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.73	KPI 1.1.1.1.74	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.75	KPI 1.1.1.1.76	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.77	KPI 1.1.1.1.78	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.79	KPI 1.1.1.1.80	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.81	KPI 1.1.1.1.82	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.83	KPI 1.1.1.1.84	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.85	KPI 1.1.1.1.86	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.87	KPI 1.1.1.1.88	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.89	KPI 1.1.1.1.90	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.91	KPI 1.1.1.1.92	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.93	KPI 1.1.1.1.94	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.95	KPI 1.1.1.1.96	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.97	KPI 1.1.1.1.98	100%
		Indikator Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama Kategori Kinerja Utama	KPI 1.1.1.1.99	KPI 1.1.1.1.100	100%

Sumber: Dit. Administrasi, Itasca Perikanan dan Kelautan (Itasca) 2024

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merencanakan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang terdapat pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Lentera H/VD/Unit kerja sendiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Outcome (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Kelautanan Pasuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautanan Pasuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1884/137/Kpts/DKUP-1/2023 (selengkapnya terlampir).

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah target pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam tahun waktu tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merencanakan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang terdapat pada

sesuai strategi dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dibawah Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penguatan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi seperti pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

2.5.1. Perjanjian Kinerja 2024 Induk

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bopok PI Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel 11.2
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

KPI	Uraian Strategi	Indikator Kinerja	Dimensi	Tujuan Tahunan	Tujuan Triwulanan	Tujuan TM
1.	Meningkatkan jumlah luas perikanan	Produktivitas perikanan (T/m ² /td)	Ekuitas	6,94	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 0,88
2.	Meningkatkan produksi perikanan	Produksi Perikanan (T/m)	Kelembagaan	20.503,01	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	6.833,01 12.202,01 18.424,50 24.565,51
3.	Meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi	Uji Mutu Pangan Masyarakat (FPM) Sampel	Kelembagaan	5,77	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 07,77

Sumber : The Development, Data Perikanan dan Ketahanan Pangan 2023

Tabel 11.3
Rangkuman Anggaran Ades pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

KPI	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Produktivitas perikanan	Program Pengembangan Dan Pengembangan Sempit Perikanan	Rp. 10.477.410.412,-	APBD

		Program Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pegawai	Rp 2.029.250.000,-	APBD
		Program Pengabdian Masyarakat	Rp 2.018.000.000,-	APBD
		Program Pendidikan Juklak Pegawai	Rp 1.214.973.700,-	APBD
		Program Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Perikanan	Rp 1.68.000.000,-	APBD
1	Program Perikanan	Program Pengabdian Masyarakat Perikanan dan Kelautan Masyarakat Kabupaten	Rp 1.176.000.000,-	APBD
		Program Pengabdian dan Pengembangan Sektor Perikanan	Rp 2.310.050.200,-	APBD
2	Salah satu Program Kegiatan (PK) Lainnya	Program Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Perikanan	Rp 1.19.000.000,-	APBD
		Program Pengabdian dan Pengembangan	Rp 10.714.000,-	APBD
		Program Pengabdian Masyarakat dan Kelautan	Rp 8.967.000,-	APBD
		Program Pengembangan Masyarakat Perikanan	Rp 100.324.000,-	APBD
		Program Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Perikanan (Program yang tidak termasuk dalam indikator)	Rp 10.400.000.000,-	APBD

Sumber: The Government Data Services dan Sistem Informasi SIPD

2.5.2. Perubahan Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Perubahan Ke-3)

Pada tahun 2024, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pratéa Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 melaksanakan lima Perubahan Kinerja Tahun 2024. Lima dilakukan karena dengan dilaksanakannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor : B274/KA05/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu "Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, proyeksi realisasi strategi untuk mencapai kinerja, dan kebijakan agennya", sehingga perlu melakukan penyesuaian pada tahun Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kasub) Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: BA-601/DPKP/PK/2024 Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 11.6
Perubahan Kinerja Berdasarkan Ke 3 Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No	Kategori Strategi	Indikator Kinerja	Dasar	Target Tahunnya	Target Tahunan	Target TR
1.	Penyediaan prasarana pertanian	Produktivitas pertanian (Tons/ha)	Tons/ha	0,94	Tahunan I Tahunan II Tahunan III Tahunan IV	- - - 0,94
2.	Penyediaan prasarana perikanan	Produksi Perikanan (Tons)	Tons	23.000,00	Tahunan I Tahunan II Tahunan III Tahunan IV	5.325,97 14.675,04 21.677,94 26.321,05
3.	Melaksanakan kegiatan program peng. ket. pangan	Salah satu program kegiatan (FPR) (Rp20000)	Rp	8948	Tahunan I Tahunan II Tahunan III Tahunan IV	- - - 8948

Sumber : Dit. Perencanaan, Dit. Peradilan dan Organisasi Pangan, 2024

Tabel 11.7
Komponen Anggaran Indeks pada Perjanjian Kinerja Tersebut dan 3 Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Saluran
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Pak	Rp 10.127.400,00	APBD
		Program Peng. Ket. Pangan		
		Program Penyediaan Pak	Rp 10.96.800,00	APBD
		Program Perikanan Perikanan		
		Program Penyediaan Perikanan	Rp 24.13.000,000	APBD

		Program Promosi Usaha Perikanan	Rp. 311.271.700,-	APBD
		Program Pengendalian Dera Pengendalian Penyakit Perikanan	Rp. 3.400.000.000,-	APBD
2	Pendidikan	Program Pengendalian Kualitas Perikanan dan Kesehatan Masyarakat Perikanan	Rp. 1.876.875.000,-	APBD
		Program Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 23.000.000.000,-	APBD
3	Daya Peka Masyarakat (DPM) Kawasan	Program Pengendalian Dera Pengendalian Penyakit Perikanan dan Kesehatan Perikanan	Rp. 1.100.000.000,-	APBD
		Program Pengendalian Dera Pengendalian Penyakit Perikanan	Rp. 170.730.000,-	APBD
		Program Pengendalian Dera Pengendalian Penyakit Perikanan	Rp. 929.270.000,-	APBD
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 140.000.000,-	APBD
		Program Pengendalian Dera Pengendalian Penyakit Perikanan (Program yang tidak termasuk dalam indikator)	Rp. 70.000.000.000,-	APBD

Sumber: Data Administrasi, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan

2.5.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Perubahan ke-II)

Pada tahun 2024, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Revisi dilakukan karena adanya perubahan kebijakan dan realisasi anggaran serta telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada beban Anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selain dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kedua) Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan

Bunga Selang Nomor: BA-002/DPKP/PK/2024 (lanjutan)
 Kinerja Periklanan adalah sebagai berikut:

Tabel 11.8
Perjanjian Kinerja Periklanan No. 02 Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pungut
Prerinci: Rencanakan Anggaran Selang Tahun 2024

NO	Sebaran Anggaran	Indikator Kinerja	Dimensi	Target Tahunan	Target Triwulanan	Target TM
1.	Penyediaan publikasi perikanan	Penyediaan publikasi perikanan (Tua/Baru)	Triwulanan	5,44	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 5,44
2.	Penyediaan publikasi perikanan	Publikasi Perikanan (Tua)	Tahun	23.300,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	5.825,00 14.575,00 11.475,00 26.300,00
3.	Keanggotaan Komunitas perikanan	Keanggotaan Komunitas perikanan (PPI/Kelompok)	Bulan	80,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 80,00

Sumber: Tim Perencanaan, Dinas Perikanan dan Kelautan Pungut 2024

Tabel 11.9
Rangkuman Anggaran: Indeks pada Perjanjian Kinerja Periklanan No.02 Kepala Dinas
Perikanan dan Kelautan Pungut Prerinci Rencanakan Anggaran Selang Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Program	Rencana	Salinitas
1.	Penyediaan publikasi	Program Penyediaan Publikasi	Rp 5.113.700,00	40%
		Program Penyediaan Publikasi Perikanan		
		Program Penyediaan Publikasi Perikanan	Rp 1.943.000,00	40%
		Program Penyediaan Publikasi Perikanan		
		Program Penyediaan Publikasi Perikanan	Rp 1.210.000,00	40%
		Program Penyediaan Publikasi Perikanan	Rp 1.160.700,00	40%
2.	Keanggotaan Komunitas	Program Keanggotaan Komunitas Perikanan	Rp 700.000,00	40%
		Keanggotaan Komunitas Perikanan		
		Keanggotaan Komunitas Perikanan		
		Keanggotaan Komunitas Perikanan		
		Keanggotaan Komunitas Perikanan	Rp 1.670.000,00	40%
		Keanggotaan Komunitas Perikanan		

2.	Indikator Kinerja Program Masyarakat (PMK) Kawasan	Program Pengabdian Masyarakat Dinas Perikanan dan Kelautan dan Kementerian PUPP	Rp 0,-	000000
		Program Pengabdian Masyarakat Pangan	Rp 1.147.711.200,-	000000
		Program Pengabdian Masyarakat dan Kelautan Pangan - Himpunan	Rp 1.144.400.000,-	000000
		Program Pengabdian Masyarakat Pangan	Rp 1.144.400.000,-	000000
		Program Pengabdian Masyarakat Perikanan dan Kelautan Pangan (Program yang tidak termasuk dalam indikator)	Rp 1.144.400.000,-	000000

Sumber: Ditjen Perikanan Darat, Direktorat dan Evaluasi Kinerja 2024

Keterangan Tambahan:

- Indikator Kinerja tidak berubah, karena terdapat perubahan pada Target Kinerja karena menyesuaikan dengan arahan dalam Surat Kementerian Perikanan dan Kelautan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: H274/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu "Menggunakan indikator capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyusunan skema strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya", sehingga dilakukan perubahan. Dibandingkan PK awal, anggaran pada PK Perubahan ke II berkurang 7,51% selisahnya akibat relokasi Program/Tegiatan non prioritas dan realokasi anggaran untuk pembiayaan Program/Kegiatan prioritas.
- Data capaian kinerja terdapat pada Triwulan IV.
- Mengikuti Anggaran Dekonsentrasi yaitu:
 - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Daging Hortikultura: Rp 177.312.000,-
 - Program Kemandirian Akses dan Kualitas Pangan Berkelanjutan Daging Ternakan Pungsi: Rp 226.109.000,-

- 1.3 Program Nili Teratih dan Dayu Saing Infeksi Ditjen Perkehuasan: Rp 129.400.000,-
- 1.4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vaksin Badan Penyelidikan dan Pengembangan SDM Pertanian: Rp 1.370.886.000,-
- 1.5 Program Ketersediaan Akses dan Koneksi Program Berhadkes Badan Pangan Nasional: Rp 2.219.448.000,-

2.0. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <https://dinas.holtikpang.go.id/>. Di dalam website ini terdapat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditayangkan beberapa kegiatan terdahulu yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengumuman, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Laporan (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat), Informasi Badan Publik, Berita dan Publikasi, serta Sosial Media Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 2.1.

Website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengalokasian atau kinerja yang diperjanjikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024.

Pengalokasian anggaran Perencanaan Menteri Dalam Negeri Nomor Di Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 30.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Interval Perkiraan Realisasi Kinerja	Kriteria Grade
1.	91 s 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 s 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 s 75	Sebagi	Kuning Tua
4.	51 s 65	Rendah	Kuning Muda
5.	< 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permenpan RB Tahun 2017

Pengalokasian target kinerja dari sumber strategi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

2020-21
 Department of Management Studies

Sl. No.	Name of the Candidate	Registration No.	Semester I					Semester II	Total Marks	Percentage
			Maths	Physics	Chemistry	English	Practical			
1	[Name]	[Reg. No.]	[Mark]	[Mark]	[Mark]	[Mark]	[Mark]	[Total]	[Percentage]	
2	[Name]	[Reg. No.]	[Mark]	[Mark]	[Mark]	[Mark]	[Mark]	[Total]	[Percentage]	
3	[Name]	[Reg. No.]	[Mark]	[Mark]	[Mark]	[Mark]	[Mark]	[Total]	[Percentage]	



Alasan strategis (tujuan hiererki) sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Peningkatan produktivitas pertanian

Eraja sasaran peningkatan produktivitas pertanian diukur dengan indikator produktivitas pertanian. Komponen indikator sasaran, indikator dan formula perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Rincian Indikator dan Formula Perhitungan (Sasaran 1)

No	Indikator	Subindikator	Formula Perhitungan
1	2	3	4
1	Produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas lahan. Produktivitas Pertanian: $(13,9 + 4,37 + 4,51) \div 7,48$ $4,02 \text{ Ton/Ha}$

Sumber: Dit. Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Eraja sasaran peningkatan produktivitas pertanian diukur dengan menggunakan formula perhitungan: Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas lahan dari komoditi Hortikultura (13,9+4,37+4,51)=7,48 Ton/Ha), Tanaman Pangan (4,02 Ton/Ha) dan Perkebunan (3,31 Ton/Ha) yang merupakan subsektor pertanian, lalu dibagi rata-rata dari penjumlahan masing-masing komoditi. Tahun 2024 capaian kerja sasaran ini adalah 7,02 Ton/ha atau sebesar 101,19% dari target 6,94 Ton/ha. Sumber data diolah dari Angka Semesta (ASEM) Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasil perhitungan rata-rata kerja masing-masing program pendukung sasaran Pertanian Daerah.

Eraja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2024 terdapat sasaran peningkatan produktivitas pertanian dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL 10.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 (Sesuai I)

No	Indikator Kinerja	Rencana 2023 (Target)	2023			2024			Target Kinerja Kinerja (2024)	Sesuai I/II 2024 (Rencana Target 2024)
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Produktivitas pertanian	4,73	4,61	4,73	101,29	4,66	7,62	101,10	7,65	11,700

Sumber: Dit. Kearsifan dan Cipta, berdasarkan data Kementerian 2024

Analisis Ketercapaian Sistem produktivitas pertanian adalah sebagai berikut:

- Tercapai 7.62 Ton/ha dengan efisiensi persentase realisasi terhadap target sebesar 101,15 % (melampaui).
- Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 101,29% indikator sasaran Produktivitas Pertanian mengalami penurunan sebesar 0,14 %.
- Dibandingkan dengan target sdnr BENSTRA, diproyeksikan sasaran tercapai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam indikator persentase capaian tersebut adalah dari program-program sebagai berikut:

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan sasaran program terwujud dan berkembangnya sarana pertanian, merupakan indikator:
 - Pencapaian terwujudnya peredaran pupuk, pestisida, obatan dan sarana pendukung peningkatan produksi, formula perbitangan indikator ini adalah Perbandingan pengaplikasian pemuliharaan pada tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(100/100) \times 100 = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 100%.



b. Persentase peningkatan hasil tanam tanaman pangan dan hortikultura, formula perhitungan indikator ini adalah membandingkan antara hasil tanam tahun berjalan (n) dengan tahun sebelum (n-1), dibagi luas tanaman tahun sebelum (n-1), dikali 100%. Nilai hasil ini sama dari jumlah masing-masing komoditi yang diintervensi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diintervensi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain padi, jagung, cabai besar, cabai kecil, bawang merah, bawang putih, dan alpukat. Capaian kinerja indikator dapat dilihat melalui perhitungan berikut $\sum \left(\frac{(\text{hasil tahun berjalan} - \text{hasil tahun sebelumnya})}{(\text{luas tahun sebelumnya})} \times 100\% \right) = 155\%$ target 2,5% atau sebesar 157,91%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 4,82%.

c. Persentase peningkatan hasil tanam perkebunan, formula perhitungan indikator ini adalah membandingkan antara luas tanam komoditas perkebunan yang diintervensi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun berjalan (n) dengan luas tanam komoditas perkebunan tahun sebelum (n-1), dibagi luas tanam tahun sebelum (n-1), dikali 100%. Komoditi perkebunan yang diintervensi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 adalah Komoditi Kelapa Sawit. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 1,5%. Capaian kinerja indikator dapat dilihat melalui perhitungan berikut $\sum \left(\frac{(\text{luas tanam tahun berjalan} - \text{luas tanam tahun sebelumnya})}{(\text{luas tahun sebelumnya})} \times 100\% \right) = 1,77\%$ dari target 1,5% atau sebesar 118,12%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 2,45%.

6. Peningkatan hasil/nilai tanaman (jumlah biji, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat, perhitungan indikator ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah hasil/nilai pertanian berlabel dan bersertifikat tahun berjalan (x), dibanding jumlah hasil/nilai pertanian berlabel dan bersertifikat tahun berjalan (y - 1), dibagi menjadi hasil/nilai pertanian berlabel dan bersertifikat tahun sebelum (y - 1), dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\left[\frac{(x/nilai) - (y/nilai)}{(y/nilai)} \times 100\% \right] = 1\%$ dari target 5% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini cara bisa dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 5%.

Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Terjalarnya koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- Terselenggaranya dukungan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- Menegatifkan pengetahuan dan kesadaran petani tentang cara penanganan, pengolahan, dan budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*).

Capaian ini menginspirasi kendala sebagai berikut:

- Kelompok tani sering diabaikan sebagai alat atau wadah untuk memberikan bantuan/dukungan yang berkaitan dengan program pemerintah sehingga pembentahan dan pemantapan kelompok tani banyak dilakukan karena adanya proyek bantuan tersebut, sehingga berakibat kelompok tani tidak meningkat bila kemampuannya atau bahkan tidak bergerak;
- Alibi biaya lahan pertanian menjadi lahan terbangun;
- Kondisi ekuitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga menyulitkan produksi pertanian pertanian.

- Terjadinya rebahan anggaran pada tahun 2024 sehingga menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seperti: pengadaan bibit kopi sebanyak 29.000 batang, pupuk organik kopi sebanyak 217.000 kilogram dan pestisida sebanyak 1.000 liter.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya Prasarana Pertanian, mempunyai indikator:

- a. Kaito menyediakan prasarana pertanian, dengan formula perhitungan kebutuhan prasarana pertanian di bag ketersediaan, di nilai 100%. Capaian indikator adalah $\left(\frac{285}{300} \times 100\%\right) = 95\%$ dari target 100%. Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama bisa dilaksanakan dengan capaian Tahun 2023 sebanyak 95% atau tercapai 100%.

Target Tahun 2024 sampai disalahkan oleh beberapa alasan seperti:

- Terjadinya koordinasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
- Terselenggaranya Petugas/Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten/ramah.

Capaian ini mengitari kendala sebagai berikut:

- Terjadinya Perubahan Anggaran Kegiatan Pengadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC2B di tingkat Provinsi dari Rp 292.000.000,- menjadi Rp 6--dikurangkan Revisi/ang Kegiatan Non Prorata.

3. Program Pemetaan Usaha Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai indikator ukuran pemetaan usaha pertanian. Formula perhitungan adalah

jumlah dokumen perjanjian usaha pertanian. Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dan target sebesar 1 dokumen. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% sama bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu 1 dokumen.

Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Penerapan standar dan Iso Usaha Pertanian

Capaian ini mengahului kendala sebagai berikut:

- Terdapat perbedaan standar satuan biaya (SBE) sehingga penyerapan anggaran tidak dapat diuraip secara maksimal

4. Program Pengendalian dan Penguatan Sistem Perikanan dengan asumsi program peningkatan produktivitas perikanan mempunyai indikator kinerja:

a. Dokumen laporan pengendalian dan pengawasan Daerah Perikanan Ikan (DPI) berbasis perhitungan indikator ini adalah jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Daerah Perikanan Ikan (DPI). Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dan target 1 dokumen. Capaian kinerja pada tahun 2024 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebanyak 1 dokumen atau tercapai 100%.

b. Terlaksananya Rencana Perikanan akhiv sebagai Organisasi Penggerak Ternakan (OPT), berbasis perhitungan indikator ini adalah (jumlah Persentase perbandingan antara target hasil lilitan (Hs) yang terkendali Organisasi Penggerak Ternakan (OPT) pada komoditi Ternakan Pangan, Budikultura dan Perikanan dengan realisasi jumlah Lilitan (Rl) Rahun Pengendali OPT yang dilaksanakan) dan diwujudkan ke Faktas dan Capaian. Capaian indikator kinerja ini adalah 61,9% dari target 78. Capaian kinerja

pada tahun 2024 ini lebih realistis dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yang sebesar 79%.

Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Terlaksananya sinergisitas dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait serta dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- Terlaksananya Pengabdian Organisasi Penggabung Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, HutanKultur, dan Perikanan.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut:

- Terjadinya Pengurangan Anggaran yang menyebabkan Bekerjaan Kegiatan Non Prioritas;
- Kurangnya keabsahan paten untuk mengkomersialkan usahanya;
- Masih kurangnya pengetahuan petani terkait pengabdian Organisasi Penggabung Tumbuhan (OPT).

5. Program Peningkatan Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai Indikator Peningkatan peningkatan metode, teknologi informasi dan kelengkapan penyediaan pertanian. Formula perhitungan indikator ini adalah $\frac{\text{Persentase jumlah penerapan informasi tehris dan inovasi pertanian yang diterapkan pada Rada Penyediaan Pertanian (RPP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 32 penerapan di 32 RPP} + (32 \times 32)}{2} \times 100 = 100\%$ dan target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yang sebesar 90%.

Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Adanya peningkatan kinerja penyuluh pertanian lapangan dalam melakukan pengabdian dan pendampingan kelompok tani;

- Banyaknya sosialisasi, pelatihan, kunjungan teknis dan informasi yang dapat di akses dari media online untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan SIM (petani/penyadik).

Capaian ini mengadani kendala sebagai berikut:

- Penghapusan sub kegiatan Penyediaan dan Perawatan Kapasitas Penyadik pertanian dan sub kegiatan Dukungan Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian dikategorikan sebagai Kegiatan Non Prioritas;
- Keterbatasan anggaran SIM (petani) untuk mengadakan hal-hal lain terutama yang berkaitan dengan teknologi.

Tabel 10.5

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PI dengan Realisasi Tahun 2020 (Jumlah %)

No.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Kegiatan	Target Nasional	Target PI	Realisasi Nasional	Realisasi PI	Capaian Nasional	Capaian PI
1.	Total luas persadahan (luas total persadahan) di wilayah lokasi Produktivitas Ditempat $(1331 - 1387) \div 4571 \times 100$ $1331 - 1387 = -56$ $-56 \div 4571 = -1,22$ $= 7,02$ Tons/ha	7,7	6,94	7,47	7,02	92,17 %	92,17 %

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

- Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Produktivitas Pertanian berada dibawah Target Nasional.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator Produktivitas Pertanian berada dibawah Realisasi Nasional.
- Sebagai kesimpulan capaian indikator Produktivitas Nasional berada dibawah capaian Nasional yaitu sebesar 92,17 %. Hal tersebut disebabkan karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak merupakan daerah Sentra Produksi Pertanian.

A.1.1.1. Data Beking Capaian Produktivitas Pertanian (Indikator ke 1) Melalui Program

Program *Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian* melalui pada Bidang *Pasar dan Sarana Pertanian*, Bidang *Tanaman Pangan dan Hortikultura*, Bidang *Perkebunan*, Bidang *Perikanan dan Kesehatan Hewan*, UPTD *Sakit Besar Pertanian*, UPTD *Pengawasan dan Sertifikasi Mata Besar*. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- Kegiatan *Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian* dengan anggaran sebesar Rp 514.021.700,-;
- Kegiatan *Pengawasan Mata, Penyulhan dan Peredaran Benih Tanaman* dengan anggaran sebesar Rp 7.773.263.412,-;
- Kegiatan *Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro-Organisme Kelestarian Pribadi* dengan anggaran kegiatan sebesar Rp 27.693.808,-.

Gambar 81.1

Dokumentasi Program *Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Indikator 1)*

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		Kegiatan <i>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>



Kegiatan Pengamanan
Batas Desa dan
Perbatasan Berhikmat

1		<p>Kegiatan Pengkajian Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kawasan Provinsi</p>
---	---	--

Sumber: *Wawancara* dengan *Juanares Angri, 2019*

Program Penelitian dan Pengembangan Prosesasi Pertanian melekat pada Bidang Pascapanca dan Sarana Pertanian Kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kegiatan Penelitian Prosesasi Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 1.934.900.000,-.

Selanjutnya

Submenyusun Program Penelitian dan Pengembangan Prosesasi Pertanian

No.	Submenyusun Pelaksanaan kegiatan	keterangan
1		<p>Kegiatan Penelitian Prosesasi Pertanian</p>



Sumber: *Wahana Usaha Pertanian dan Industri Agribisnis, 2021*

Program Dytotina Usaha Pertanian meliputi pada Bidang Perikanan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kegiatan Perikanan Ipa Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 521.074.700,-.

Sektor 04.3

Dibawahnya Program Perikanan Usaha Pertanian

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		<p>Kegiatan Perikanan Ipa Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>

Sumber: *Wahana Usaha Pertanian dan Industri Agribisnis, 2021*

Program Program Pengendalian dan Penguangan Bercana Pertanian meliputi pada Bidang Pemasaran dan Sistem Pertanian dan IPTD Balai Prontek Tanaman. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pengendalian dan Penguangan Bercana Pertanian Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 391.168.954,-

Tabel 31.4
 Dokumentasi Program Pengendalian dan Penguangan Bercana Pertanian

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Kegiatan Pengendalian dan Penguangan Bercana Pertanian Provinsi

Sumber : www.ditran.go.id dan www.ditran.go.id tanggal 2019

Program Penyuluhan Pertanian meliputi pada Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pengembangan Pemuda Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar 2.296.980.000,-

Gambar 31.3
 Dokumentasi Program Tripartit dan Perencanaan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		Kegiatan Pergerakan/gerakan Pergerakan Perencanaan Perencanaan

Sumber: Dokumen Kerja Perencanaan dan Pelaksanaan Program, 2021

1.1.2. Sasaran : Peningkatan produksi peternakan

Kinerja sasaran peningkatan produksi peternakan diukur dengan indikator produksi peternakan. Penjelasan Indraguna sasaran, indikator dan formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 16.6:
Rincian dan Indikator dan Formula Perhitungan (Sasaran 1)

No	Sasaran	Indikator	Formula/Perhitungan
1	2	3	4
1	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan	Produksi Peternakan: Total produksi produksi ternak (sapi, kambing, babi, ayam, bebek, ikan, udang, dll) (Ton) Produksi Peternakan $(22.000.000 \text{ kg} + 1.700.000.000 \text{ kg}) / 1.000$ $= 20.920.400 \text{ Ton}$

Sumber : Dit. Peternakan, Dinas Pertanian dan Perikanan, 2024

Kinerja sasaran peningkatan produksi peternakan diukur dengan menggunakan formula perhitungan Perbandingan Produksi ternak yang dikalikan dalam periode waktu 1 (satu) tahun. Capaian kinerja sasaran ini adalah **20.920,40 Ton** atau sebesar **102,11%** dari target **20.480,00 Ton**, sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangko Daerah. Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap sasaran peningkatan produksi peternakan pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 16.7:
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Sasaran 1)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023/2024	2024		2024		Target Akhir Sasaran (2024)	Tingkat 2024/Target (2024)
			Target	Realisasi	% Capaian	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan produksi	20.920.400	20.480.000	20.920.400	102,11	20.480.000	20.920,40	102,11

Sumber : Dit. Peternakan, Dinas Pertanian dan Perikanan, Agustus 2024

Analisis Ketercapaian Sasaran penuguhan Pradikol peternakan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 29923,46 Ton, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 102,11%, (melampaui).
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 110,91% indikator sasaran produksi peternakan tercapai dengan persentase sebesar 5,81%.
- c. Dibandingkan dengan target akhie BEMSTRA, di proyeksikan sasaran tercapai.

Keterhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut diungkap dari program-program sebagai berikut:

1. Program Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan sasaran program terwujud dan berkembangnya sarana pertanian, mempunyai indikator:
 - a. Persentase pertambahan angka populasi ternak, formula perhitungan indikator ini adalah perbandingan angka populasi ternak tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelum (n - 1), dibagi angka populasi ternak tahun sebelum (n - 1), dikali 100%. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 5%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\sum \left(\frac{10791 - 10710}{10710} \times 100\% \right) = 0,75\%$ dari target 5% atau sebesar 110,21%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 5%.
 - b. Persentase Persentase peningkatan produksi hasil ternak, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah produksi hasil/hasil ternak tahun berjalan (n) dibandingkan dengan jumlah produksi hasil/hasil ternak tahun sebelum (n-1) dibagi jumlah produksi hasil/hasil ternak tahun sebelum (n-1) dikali 100%. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 2,5 %. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah

$\Sigma \left(\frac{117,63 - 90}{117,63} \times 100\% \right) = 2,948$, id dari target 2,5% atau sebesar 117,63%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 3,25%.

Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Terjadinya koordinasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- Menjalankan prosedur ternak dalam daerah;
- Menjalankan tawar angka keternakannya caplay bibit ternak di IPTD Baka Berek Pertanian tahun 2024;

Capaian ini mengawali kendala sebagai berikut:

- Terjadinya keterbatasan kegiatan cetak informasi anggaran TA 2024 yang menyebabkan pembatasan output kegiatan; pengalihan bibit ternak (sapi) dari 50 ekor menjadi 60 ekor menggunakan dengan dukungan anggaran yang tersedia.

2. Program Pengendalian Kematian Hewa Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan sasaran program peningkatan produksi peternakan mengartikan indikator penurunan persentase kasus penyakit hewar menular dengan target penurunan 2%. Formula perhitungan indikator ini adalah jumlah kejadian/ kasus penyakit hewar menular tahun berjalan (t) dikurangi jumlah kejadian/ kasus penyakit hewar menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah kejadian/ kasus penyakit hewar menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 4% dari target 2% atau sebesar 200%. Perhitungannya adalah hasil capaian penurunan kasus PMK dan 2024 mencapai 96%, sedangkan penurunan kasus pada 2023 mencapai 97%. Penghitungannya berupa $(96-97)/97 \times 100\% = 4\%$. Capaian kinerja pada Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 11%.

TARGET TAHUN 2024 TERCAPAI DIBAWAH SIKU BEBERAPA ZINAT SEPERTI:

- Terjadinya sinergisitas dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- Pelaksanaan vaksin dan pemberian obat kepada hewan ternak sapi, kambing, dan kerbau untuk mencegah penyakit perkebunan Penyakit;
- Menyiapkan tim kerja keterampilan capaian bibit ternak di WTO Kelas Bawah Pertanian tahun 2024.

Capaian ini mengahiri kendala sebagai berikut:

- Terjadinya rufacing kagatan untuk efikasi anggaran TA 2024;
- Terjadinya Penyakit Makai dan Kaku dan Lunyu Sisa Damsa sudah ditetapkan sebagai wilayah dari penyehatan yang rusak.

Tabel 10.10

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 (Persentase)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Nasional	Target PD	Realisasi Nasional	Realisasi PD	Capaian Nasional (%)	Capaian PD (%)
1.	<p>Frekuensi Pelaksanaan Vaksin perkebunan ternak perkebunan ternak (sapi, kambing, kerbau, itik).</p> <p>Frekuensi Pelaksanaan: 22.364.754.174 kg + 2.711.89324 kg / 1000 = 25.076.598 t/m</p>	677.640	24.063,39	4.91.276	20.023,62	100,00 %	102,11 %

Sumber: TD Pemasokan, Dinas Perikanan Kabupaten Sida

- Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Frekuensi Pelaksanaan ternak dibawah Target Nasional.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator frekuensi pelaksanaan ternak dibawah Realisasi Nasional.
- Sebagai kesimpulan capaian indikator Frekuensi Pelaksanaan ternak dibawah capaian Nasional yaitu sebesar 102,11%. Hal ini dikarenakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mempunyai daerah Sentra produksi perikanan.

3.1.2.1. Bata Dukung Capaian Produksi Peternakan (Indikator No 3) Melalui Program

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terkait pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UPTD Bata Dukung Ternak. Kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kegiatan Penyediaan Bata/Blok Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbangkan dari Daerah Provinsi Lain dengan anggaran sebesar Rp 1.254.433.810,-.
- b. Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Motivasi Bata/Blok Ternak dan Tenaga Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan dengan anggaran sebesar Rp 600.000.000,-.

Gambar 31.8

Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Indikator 3)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		Kegiatan Penyediaan Bata/Blok Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbangkan dari Daerah Provinsi Lain

Sumber: *Wawancara* dengan Peternak Ternak dan Peternak Ternak, 2019

Program Peningkatan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui pada Bidang Pemasukan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan sebagai berikut yaitu :

- a. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Hewan Penetapan dan Pembinaan Daerah Bebas Penyakit Hewan Menular Latas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 240.332.400 ;
- b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengiriman Hewan dan Produk Hewan Latas Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 194.288.400 ;
- c. Kegiatan Penetapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Ternak/Kongkarnes Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produktif Hewan dengan anggaran sebesar Rp 274.333.800 ;

Gambar 88.7

Dokumen dari Program Pemasukan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No.	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		<p>Kegiatan Peningkatan Kesehatan Hewan, Penetapan dan Pembinaan Daerah Bebas Penyakit Hewan Menular Latas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>

2		<p>Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</p>
3		<p>Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Sertifikat Zona/Kooperatives Bebas Penyakit dan Dac Usaha Petak Hewan</p>

Sumber : Ditmas, Ditpa, Perikanan dan Aquakultur, Agustus 2019

3.1.3. Sasaran : Meningkatkan kesadaran masyarakat pangan yang bergaram

Kesaja sasaran meningkatkan kesadaran masyarakat pangan yang bergaram diukur dengan indikator Skor Pola Pangan (SPPH) Masyarakat yaitu N4a yang dibuktikan pada perubahan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang kesadaran pangan masyarakat dengan perhitungan: $(n-1)$. Penjelasan

bagian secara indikator dan formula perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Skema dan Indikator dan Formula Perhitungan (Dimensi 3)

No	Indikator	Indikator	Formula Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Indeks Pola Pangan Harapan (IPPH) Nasional	<p>Formula Perhitungan: $\text{IPPH} = \frac{\sum (\text{Kategori Pangan} \times \text{Persentase})}{\sum (\text{Kategori Pangan} \times \text{Target})}$</p> <p>Indikator ini mengacu pada Indeks Pola Pangan Harapan (IPPH) Nasional yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberagaman pangan yang dikonsumsi. Indikator ini dihitung berdasarkan persentase konsumsi pangan yang beragam.</p> <p>Metode perhitungan adalah sebagai berikut: $\text{IPPH} = \frac{\sum (\text{Kategori Pangan} \times \text{Persentase})}{\sum (\text{Kategori Pangan} \times \text{Target})}$</p> <p>Sumber: BPS, 2024. https://www.bps.go.id</p>

Sumber: Tim Penelitian, Data Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Kemerya secara peningkatan Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dalam rangka meningkatkan formula pengalokasian data sumberdaya energi kelompok pangan Properti konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kelompok KKP/AN tahun 2024 yaitu: (1) Padi-padiun 50%, (2) Lumbung serealia 6%, (3) Pangan kacang 12%, (4) Niyak dan leruk 10%, (5) Buah dan biji-bijian 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 3%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lainnya (Bumbu) 3%. Selanjutnya, hasil perhitungan antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan berdasarkan data konsumsi diolah melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan dan diperoleh skor IPH Konsumsi sebesar 90,20 dengan persentase realisasi sebesar 101,36% terhadap target tahun 2024 yaitu 88,09. Dibandingkan capaian target skor IPH Konsumsi tahun 2023 sebesar 87,90 terjadi peningkatan sebesar 2,73%.

Kemerya Data Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap secara Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 (Gusman II)

No	Indikator Kinerja	Indikator 2023/2024	2023			2024			Target Akhir Rencana (2024)	Pencapaian 2024 (Periode 1-10 Mei 2024)
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Skor PFI (0-100000)	90,2	94,40	87,90	97,64	94,40	90,2	181,20%	90,21	99,90%

Sumber : Dit. Keresnasan, Dinas Keresnasan dan Lingkungan Hidup, 2024

Analisa Ketercapaian sasaran meningkatnya konsumsi pangan yang terapan adalah sebagai berikut:

- Tercapai skor PFI Konsumsi sebesar 90,20 dengan formula persentase realisasi terhadap target sebesar 101,36% (yang dicapai);
- Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 101,64% indikator skor PFI Konsumsi mengalami penurunan sebesar 1,20%;
- Dibandingkan dengan target skor BERNUSA, di proyeksikan amaran terapan.

Keberhasilan capaian indikator persentase capaian tersebut didukung dan program-program sebagai berikut:

- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Kesehatan Pangan Masyarakat dengan secara program meningkatnya konsumsi pangan yang terapan mempunyai indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Formula perhitungan indikator ini adalah Pengalihan nilai yang didasarkan pada perubahan orang dari kelompok pangan utama melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan. Capaian indikator kinerja adalah 94,3 dari target sebesar 84,3 dengan persentase capaian 112,37%. Capaian kinerja tahun 2024 ini meningkat bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 yang sebesar 67,6.

Capaian ini didukung (di):

- Gerakan promosi pengalihan pangan konsumsi pangan lokal.

- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Capaian ini mengadani kendala sebagai berikut:

- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi ideal masyarakat yang dianjurkan.

2. **Program Perangaihan Kerawanan Pangan** dengan sasaran program meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, menyuplai indikator Meratakan daerah rentan rawan pangan. Formula perhitungan indikator ini adalah persentase meratanya daerah rentan rawan pangan tahun berjalan dibandingkan tahun awal Rencana. Capaian indikator kinerja adalah $(5 - 10) \times -5$ Daerah dari target sebanyak 1 Daerah atau persentase capaian sebesar 500%. Daerah rentan rawan pangan meningkat dari 5 kecamatan di Tahun 2023 menjadi 10 kecamatan di Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan indikator dan cara perhitungan pada aplikasi FSKA (Kerawanan GSG ke beras) sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan indikator. Capaian kinerja pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena terjadi perubahan cara perhitungan indikator dan Badan Pangan Nasional.

Target Tahun 2024 tidak tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Perubahan cara perhitungan indikator dan klasifikasi daerah "Rentan rawan pangan" aplikasi FSKA (Food Security and Vulnerability Atlas) Badan Pangan Nasional, sehingga menyebabkan klasifikasi daerah Rentan Rawan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah;
- Menurunnya kondisi ekonomi masyarakat di Provinsi Bangka Belitung secara global yang berimbas kepada penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pangan.

Capaian ini mengadani kendala sebagai berikut:

- Terjadinya refocusing kegiatan untuk efikasi anggaran TA 2024;
- Fungsi Belfrag sebagai mitra kepedaian sangat tergantung dengan ketersediaan pasokan pangan dari luar daerah.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan sasaran program meningkatkan konsumsi pangan yang bertujuan menunjang indikator persentase pangan yang aman dikonsumsi. Formula perhitungan indikator ini adalah bobot pengawasan di pemerintah (60%) dikalikan dengan bobot registrasi dan sertifikasi (40%) pangan segar dan tambahan yang memiliki persyaratan mutu dan keamanan pangan. Capaian indikator kinerja adalah $((70\%)-(10\%)) = 60\%$ dari target sebesar 80% atau persentase capaian sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 95,77%.

TARGET TAHUN 2024 TERUPAI DICAPAIKAN oleh beberapa alasan seperti:

- Tingginya tingkat kesadaran stakeholder/pelaku usaha pertanian untuk mendefinisikan cakupan guna mendapatkan Sertifikat Trans 2;
- Efisiensi yang baik antar perantara kepedaian baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut:

- Terjadinya refocusing kegiatan non prioritas untuk efisiensi anggaran TA 2024;
- Penggunaan peralatan pangan kritis yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengakibatkan produk pertanian yang dihasilkan memiliki kadar kandungan bahan kritis yang tinggi sehingga memiliki risiko yang berdampak pada kesehatan apabila dikonsumsi.

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1	    	<p>Kegiatan Promosi Pencapaian Target Kampanye Pangan Perkampud/Tahun sesuai dengan Angka Kelengkapan GK melalui Media Promosi</p>

Program Program Pengabdian Masyarakat Fakultas terkait pada Bidang Kesehatan Pangan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi dengan anggaran sekitar Rp 167.711.300,-.

Catatan HSD

Dikembangkan Program Pengabdian Masyarakat Program

No.	Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1	   	<p>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi (Penyusunan Daftar Kepala daerah Nektar Daerah Pangan)</p>

Asasas - Proses, Dampak Persepsi dan Perubahan Pangan, 2017

Program Pengawasan Keamanan Pangan meliputi pada UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Smpg Ditebasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 126.491.000,-

Detail: Rp 0,00

Detailisasi Program Pengawasan Keamanan Pangan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Smpg Ditebasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>

Sumber : Photos taken by author and distributed program, 2022

1.1.4. Sasaran : Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah (DPKP)

Kinerja sasaran Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (TR) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai nilai skor pemerintah untuk mencapai goal government. Penjelasan indikator sasaran indikator ini berdasarkan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 18.12
Kerangka Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 4)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP)	Nilai TR Perangkat Daerah (DPKP)	Angka yang di peroleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (TR) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan secara menyeluruh

Sumber : Tim Peneliti/Manajemen Perubahan dan Satu-Pusat Pengukuran 2023

Kinerja sasaran Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) diukur dengan menggunakan formula perbandingan nilai skor hasil pengunggahan yang terdiri dari aspek pemerintah dari aspek reformasi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektoria Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023, dinyatakan bahwa Penilaian TR tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Pertanggung Jawaban Target Indikator Tahun 2024 tidak dapat dilakukan/tidak diketahui. Maka dari itu selanjutnya diukur oleh IK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/026/Kpts/DPKP-1 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menerangkan bahwa indikator Nilai RE Perangkat Daerah (DPKP) **tidak lagi digunakan**. Ditandatangani dengan capaian nilai RE Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023, capaian nilai RE DPKP tahun 2024 **tidak dapat diperbandingkan**. Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berfokus sasaran Menanggulangi tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) pada tahun 2024 dapat digantikan sebagai berikut:

Tabel 28.23
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Sasaran 6)

No	Indikator Kinerja	Target 2023	2023		2024		Target tahun Rencana (2024)	Capaian 2024 (per 30 Sept 2024)
			Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)		
1.	Nilai RE perangkat daerah (DPKP)	100%	-	100% (100%)	-	100% (100%)	100% (100%)	Indikator ini tidak lagi digunakan sejak tahun 2023

Sumber : Dit. Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Analisis Ketercapaian Sasaran menanggulangi tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) adalah sebagai berikut:

- Nilai RE perangkat daerah (DPKP) tahun 2024 tidak diaktakan, dengan demikian persentase realisasi terhadap target tidak dapat diukur;
- Dibandingkan persentase capaian tahun lalu, indikator Nilai RE perangkat daerah (DPKP) tidak dapat diperbandingkan;
- Dibandingkan dengan target akhlaq BENSTRA, di proyeksikan sasaran tidak tercapai/tidak dapat diukur.

Capaian indikator tersebut didukung dari program/program sebagai berikut:

1. Program Perangkoan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang mempunyai sasaran tertingginya urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator:

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (SPKP). Formula perhitungan indikator ini adalah Penjabaran nilai lima objek/pemerintah dalam meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja yang didapatkan dari hasil audit Aparat Perguruan Kerja Pemerintah, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 706/VI/LHE/ITDA/2024. Capaian kinerja untuk indikator ini didasarkan penjabaran dari 4 (empat) komponen penilaian yaitu: 1) Pemantauan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; dan 4) Evaluasi Kinerja dengan perhitungan $(21,60 + 23,70 + 12,45 + 21,90) = 79,65$ dari target 81,29 atau sebesar 96,89%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 77,70.
- b. Nilai Survei Kepuasan Pelayanan Internal. Formula perhitungan indikator ini adalah rata-rata nilai survei kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap 4 (Empat) aspek, yaitu: a. Pelayanan keuangan; b. Pelayanan kepegawaian; c. Pelayanan umum; dan d. Fasilitas jasa penunjang, maka didapat nilai rata-rata sebesar 60 dengan kategori "Memuaskan". Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target tahun 2024 yaitu 60. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama bisa dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 60.

Capaian ini didukung oleh:

- Dengan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengkomandoir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- Dengan sumberdaya Manusia (SDM) Dinas Pertanian dan

Tetapi: Fungsi yang konsisten dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas:

- Efisiensi sektoral dan lintas sektor yang kondusif sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik
- Ketersediaan sarana prasarana serta ketersediaan perangkat yang memadai dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi informasi
- Adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan jasa pelayanan
- Didukung anggaran untuk Perangkat Lunak, khususnya Linux Fortinet dan Koneksi Fungsi
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik

Capaian: mencapai kendali sebagai berikut:

- Revisi anggaran/Bekasring (Perencanaan dan Pelaksanaan) secara bertahap, sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara sukamati dan harus dilakukan penyusunan
- Lunanya waktu pengisian CPA Perusahaan yang baru terbit di bulan Oktober Tahun 2024, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terkendali
- Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang reorganisasi jabatan fungsional baru serta penyusunan jabatan struktural (Jabatan TC) ke jabatan Fungsional Tertentu (JFT), sehingga menyebabkan percepatan lebih lanjut

3.1.4.1 Data Dukung Capaian Misi RI perangkat daerah (Indikator ke-4) Melalui Program

Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi efektif pada Sekretariat Urusan Perencanaan dan Estimasi Pengeluaran, Kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 70.994.500,-;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 31.390.748.824,-;
- c. Kegiatan Administrasi Penulisan Daerah Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 34.095.000,-;
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 84.100.000,-;
- e. Kegiatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 671.444.095,-;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 21.013.700,-;
- g. Kegiatan Penyusunan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 5.349.665.811,-;
- h. Kegiatan Peneksternalisasi Barang Milik Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 107.578.160,-.

3.2. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja insupang tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Berdasarkan tabel II.10 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung realisasinya target kinerja tahun 2024 dengan target anggaran belanja program/bagunan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 55.147.366.409,- terrealisasi Rp 51.476.326.520,- atau 93,34% sehingga dapat diibutakan terdapat efisiensi Rp 3.671.041.889,- atau 6,66% yang bersumber dari:

- Refocusing kegiatan non-pemerintah;
- Sisa pengalihan barang dan jasa;
- Efisiensi belanja perjalanan dinas;
- Efisiensi kinerja sarpras/teknis;
- Efisiensi sewa tempat;
- Efisiensi biaya makanan dan minuman;
- DL.

3.8. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel II.11
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Tempat Pelaksanaan	Tindak Lanjut
1.	<p>Area Operasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Alamat: 7901952409/7704/2014 Bul Lampara Hasil Evaluasi 2024 SAKIP pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tanggal 04 April 2024.</p> <p>Rekomendasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat Sistem Perencanaan dan Penganggaran dalam rangka Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Pengalihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Memperbaiki Rencana Anggaran Program dan/atau kegiatan yang dapat 	<p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2024 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>Re-focus</i> Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 2. Merencanakan kembali kegiatan Program/Budget di dalam Kegiatan dan/atau kegiatan lainnya, sesuai dan selaras dengan Perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 3. Melakukan pengalihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memprioritaskan indikator kinerja yang dapat memengaruhi terdapat OIGRI, dan mengoptimalkan indikator Program/Bangunan tersebut dalam Rencana Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan

cabai sebagai upaya pengendalian infeksi di Daerah



- b. Inisiasi **KETAPANG BERGEMA** (Ketahanan Pangan Bergerak Bersama) sebagai bentuk kolaborasi dan apresiasi bagi desa-desa yang turut berkontribusi aktif dalam kegiatan ketahanan pangan, serta sebagai bentuk komitmen bersama Stakeholder dan pihak-pihak terkait untuk menanggapi ketahanan pangan desa di Provinsi Kalimantan Tengah.



- c. Inisiasi **MATA RANTING** (Melaia Teler Antupasi Risiko Anak Stunting) sebagai bentuk usaha untuk pencegahan anak stunting dengan mempromosikan CSR PT. Charoen Phosiphant Bangka berupa pemberian Teler Apun untuk lokasi-loka Stunting berdasarkan data Health-Infomation dan Pelaporan Uji Ertesis Masyarakat (e-TEGEM). Pada tanggal 19 Oktober 2024, Pj. Gubernur Bahad Supito, A.Sa, M.E. melancarkan Inisiasi Program "MATA RANTING" Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertempat di Gedung Kantor Wali Kota Pangkalpinang. Program "MATA RANTING" dilaksanakan dengan membagikan 50.000 liter Teler kepada Masyarakat di 27 Kecamatan Loka Stunting yang tersebar pada 6 Kabupaten/Kota.



3.5. Penghargaan

Sepanjang Tahun 2020, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil menerima berbagai penghargaan antara lain sebagai berikut:

1. Penghargaan Juara 1 Pawai Baris Barisan dan Juara 1 Mobil Hias Tingkat Instansi Pemerintah Pada Kegiatan Peringatan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar: Momen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

2. Penghargaan Terbaik Pertama atas kompetensi penguasaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tanggal 23 Desember 2024 di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITONG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



25
Tahun
Kemerdekaan



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Pertanian Gabel Terbaik Pertama Penguasaan SPIP

FORNASIAWASI – Saat ini telah ada 1000-an Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat penghargaan terbaik pertama atas kompetensi penguasaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).





Penghargaan ini diserahkan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nani Nani kepada Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Bangka Belitung di Wilayah dan Aspek SPIP Sektor Jasa Kesehatan, pada 23 Desember 2024.



[@dinasptnkgb](#)



[Dinas Pertanian Babel](#)



[dinasptnkgb](#)



[Dinas Pertanian](#)

3.6. Crowdfunding

Crowdfunding adalah perolehan dari instansi atau Perguruan Tinggi mana saja yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjasama.

Gambar 34.11
Ruang Crowdfunding Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Rincian Crowdfunding lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/CrowdfundingDKNP

BAB IV

Penutup

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 4 (empat) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2024, indikator kinerja Produktivitas pertanian tercapai dengan persentase 181,15 %, indikator kinerja Produktif Peternak tercapai dengan persentase 102,11 %, dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tercapai dengan persentase 101,36 %.
2. Secara Necessitasnya dua kelola internal perangkat daerah (DPRD) dengan indikator nilai Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah tidak dipilih sebagai tolok ukur karena menyelaraskan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa Penilaian KR tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Maka dari penjelasan dokumen, dibuat SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 1484/020/Kpts/DKSP-I Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menegaskan bahwa indikator Nilai KR Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi digunakan.

1. Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah:
 - a. Masih tinggi lahan pertanian produktif maupun lahan non produktif, lahan produktif petani, serta kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan gagal panen beberapa komoditas pertanian;
 - b. Terjadinya kasus penyakit hewan menular pada hewan ternak, seperti wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) dan Leptospirosis (LSD) sehingga menyebabkan meningkatnya angka kematian, baik yang disebabkan oleh penyakit maupun penyakit zoonosis. Hal tersebut juga mempengaruhi jumlah pemukiman hewan-hewan Provinsi Bangka Belitung akibat pembatasan lalu lintas hewan;
 - c. Meratanya produktivitas komoditas pertanian dan yang disebabkan kondisi cuaca ekstrim. Selain itu, tingginya kebutuhan pangan pokok tidak dapat dikecukangi oleh pangan produksi lokal sehingga menyebabkan terjadinya nilai pada beberapa komoditas pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya pada hari raya lebaran;
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi ideal yang dianjurkan sehingga mengakibatkan pola konsumsi masyarakat yang cenderung kurang beragam, baik dari jenis pangan maupun kualitasnya;
 - e. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Sedangkan untuk keberhasilan tercapainya kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah lepas dari keterbatasan data statistik, kualitas pertanian dan peternakan untuk bahan perencanaan strategis, serta beberapa faktor lain, antara lain:
 - a. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan

Sasaran Utara Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

- a. Kesehatan interval yang berjalan dengan baik. Kesehatan interval Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala dan diupayakan dalam rangka *Coffee Morning* serta *Apel Pagi* sebagai media komunikasi antar lembaga secara rutin.
- c. Kesehatan yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sebagai program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

4.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan Monitoring *Utara* (Monev) interval lengkap Utara Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menindaklanjuti implementasi Perda/Perkab Kepulauan Bangka Belitung untuk mencapai sasaran kinerja perorgat daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Menindaklanjuti peran stakeholder: swasta, dan institusi/lembaga, seperti Pihak Kepulauan, TNI, Lembaga Vertikal, dan Kementerian terkait untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat Bangka Belitung;
4. Meningkatkan komitmen dan kualitas pelayanan informasi sektor pertanian dan ketahanan pangan yang transparan dan akuntabel;
5. Menindaklanjuti rencana *Sumber Daya Manusia* (SDM) pertanian serta pembekalan *lulus non produktif* menjadi *lulus produktif* melalui *pena aktif Penyuluh Pertanian dan Instrumen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*;
6. Memelihara program nilai-nilai dasar (*Core values*) ASN "BerAKHLAK" sebagai acuan standar kerja Aparatur Sipil Negara khususnya di Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas.

4.3. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada petani tentang teknik budidaya pertanian yang sesuai dengan *Good Agriculture Practice (GAP)*, serta edukasi/pendidikan kepada petani agar lahan pertanian tidak selalu terabaikan menjadi lahan tandus;
2. Pelaksanaan Sekolah Lapangan yang bisa memberikan pengetahuan kepada petani dalam membangun Organisasi Penggarap Tani (OPT);
3. Edukasi kepada petani dan peternak tentang manfaat dari program *Awaraz Huska Tani Fadi (AHTF)* dan *Awaraz Huska Ternak Sepi (Kerkas) (AHTS/K)*;
4. Meningkatkan kapasitas SDM (petani) melalui berbagai kegiatan pendampingan dan Latihan ukh (penyuluh pertanian lapangan) serta meningkatkan kapabilitas kemampuan dan keterampilan penyuluh pertanian;
5. Mencarapkan kebijakan terkait optimalisasi lahan sesuai untuk meningkatkan produktivitas dengan melibatkan penyuluh pertanian provinsi untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan ke petani;
6. Menggalakan upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran pangan lokal khususnya kangkung, sayur dan buah melalui advokasi, kampanye, sosialisasi, dan promosi;
7. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait tidak lanjut dari pelaksanaan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Pelaksanaan Pertanian serta Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

LAMPIRAN



**Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026**

No	Tipe	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Pengembangan Produksi Pertanian	Pengembangan produksidibidang perikanan	Produksidibidang Perikanan (tmt/ha)	8,61	8,94	9,28	9,61
		Pengembangan Produksi gabungan	Produksi gabungan (tmt)	30.200,27	30.300,81	30.402,34	30.503,88
2	Peningkatan ketahanan pangan dan keselamatan makanan sasaran kehidupan ekonomi sasaran pangan dan gizi serta ketahanan pangan dan gizi sasaran ketahanan pangan dan gizi sasaran ketahanan pangan (tmt)	Peningkatan ketahanan pangan dan keselamatan makanan sasaran	Indeks Nilai Ketahanan Pangan (INP)	80,84	81,77	82,70	83,63
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi serta ketahanan pangan dan gizi sasaran	Indeks Nilai Ketahanan Pangan (INP)	80,84	81,77	82,70	83,63
3	Pengembangan sistem ketahanan pangan dan keselamatan makanan (KPKM)	Pengembangan sistem ketahanan pangan dan keselamatan makanan (KPKM)	Indeks Nilai Ketahanan Pangan (KPKM)	80,84	81,77	82,70	83,63
		Pengembangan sistem ketahanan pangan dan gizi serta ketahanan pangan dan gizi sasaran	Indeks Nilai Ketahanan Pangan (KPKM)	80,84	81,77	82,70	83,63

Sumber: Rencana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023-2026



**PEMERINTAH PROVINSI KEPRIAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jalan K. H. Agus Salvo, Pekanbaru, Kepulauan Riau - Kepulauan Riau 29115
Jl. Tello, Tanjung Gelang, Kabupaten Pangkalpinang 32112. Telp./Fax: (077) - 43900
www.kemendagri.go.id Email: panca@kemendagri.go.id, kel@kemendagri.go.id

BERITA ACARA

Format : RA-18/18/NO. 1/18/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pertemuan Diskusi Pekerjaan Kinerja (PK) Awal Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Direktor Berita Acara pertemuan Diskusi Pekerjaan Kinerja (PK) Awal Tahun Anggaran 2024 dibuat dengan menggunakan alat tulis dan ditandatangani sebagai berikut:

Tulis di Tempat
Pangkalpinang, 20 Januari 2024



Kepala Dinas
N. H. M.
Nidhiyanti Mardiyanti
NIP. 19701111-198211-1-001



PENGANTARAN KEMKES TAHUN 2024

Dalam rangka mendukung manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan mutu hasil, kerja yang berfokus layanan di bawah ini:

Nama : PTI BONDHONO, S.P., M.M.
Terdahul : Kepala Dinas Kesehatan Dan Ketahanan Pangan

Kelompok kerja sebagai (KAM) POKJAMA

Nama : Dr. SARDIWA TA, M.Si
Terdahul : Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik

Kelompok kerja sebagai (KAM) POKJAMA

Diakui bahwa terdahul akan mendukung target kinerja tahunan sesuai kegiatan dan kegiatan ini, dalam rangka mendukung target kinerja untuk memenuhi seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, implementasi dan kegiatan pencapaian target kinerja tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Diakui bahwa akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk akan melakukan evaluasi dan kualitas kinerja kegiatan secara berkala dari kegiatan ini dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan dari kegiatan.

Tanjungpinang, 20 Januari 2024

PTI BONDHONO,
P. SUBUKTIEN
EKSP. AMAN RANGGA RI TING.



Dr. SARDIWA TA, M.Si

PTI BONDHONO,
KELAS LUBANG PERUMAH
DAN KETAHANAN PANGAN



PTI BONDHONO, S.P., M.M.
NIP. 19601111399000000

**PERDAJARAN KEMERIA TAHUN 2021
DIBERS PERALIHAN DAN KETIDAKAN PANGAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Tons/ha)	6,26	Memastikan alokasi dan mutasi lahan pertanian dengan menggunakan teknologi pertanian, produktivitas pertanian melalui pemeliharaan hasil produksi komoditi pertanian dibarengi dengan pemeliharaan
2.	Peningkatan produksi perikanan	Produksi Perikanan (Tons)	26.505,8	Lakukan pemantauan tingkat AMN di perairan pada waktu nelayan dalam periode waktu tertentu. Untuk waktu yang digunakan untuk perbaikan pencapaian target indikator target (2018) 1.500,38 tons.
3.	Perdagangan barang komoditas yang strategis	Nilai Total Peranan Komoditas (Rp)	57,77	Merencanakan kegiatan perdagangan barang dan kelompok perikanan lainnya untuk meningkatkan perikanan berbasis kerjasama konsultasi dengan stakeholder

Anggaran:

NO	Indikator Kinerja (komoditas)	Program	Anggaran	Notifikasi
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dasar Peningkatan Lahan Pertanian	Rp 10.027.014,02,-	AMD
		Program Penyediaan Dasar Pengembangan Perikanan	Rp 3.400.000,00,-	AMD
		Program Penyediaan Dasar Pengembangan Perikanan	Rp 3.416.000,00,-	AMD
		Program Perikanan Usaha Perikanan	Rp 12.973.700,-	AMD
		Program Perdagangan Perikanan	Rp 16.968.554,-	AMD
		Program Perdagangan Perikanan		

2.	Produk Konsultasi	Program Penyediaan Konsultasi Akutasi Terpadu Konsultasi Hospital Vetiner	Rp 1.500.000.000,-	APBD
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sistem Pelatihan	Rp 2.500.000.000,-	APBD
3.	Duk. Pjdt. Pangan Harian (PHI) Kansum	Program Penyediaan Sediaan Uji Laboratorium Hidro Karbonat Terpadu Konsultasi Pangan	Rp 100.000.000,-	APBD
		Program Pengawasan Konsultasi Pangan	Rp 100.714.000,-	APBD
		Program Pendidikan Literasi Dan Kelembagaan	Rp 100.000.000,-	APBD
		Program Mutu Produk	Rp 100.000.000,-	APBD
		Program Pengawasan Kelembagaan Pangan	Rp 100.000.000,-	APBD
		Program Penunjang Usaha Pangan Lokal	Rp 100.000.000,-	APBD
		Program Penunjang Usaha Pangan Lokal	Rp 100.000.000,-	APBD

RIENK ALDIA,
P. GULERMAN
KORPORASI PANGAN RI TITIK



Dr. SYFROAL ZA, M.S

PROSESING, 21 JANUARI 2014

YUANI FLORIANA,
ALPITA DEVA PRAJITNO
DAS KPTMANSRI PANGAN



EDU ROMDONIKI, S.P., M.M
NIP. 19701110000000000



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Komplek Kantor & Pemukiman Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Tugu Perjuangan No. 100, Bukit Lela, Pangkalpinang 30131, Telp. Faks. (0907) 320102
<http://www.bangkabelitung.go.id> - Email : ditas@bangkabelitung.go.id ; bangkabelitung@bangkabelitung.go.id

BERITA ACARA

Nomor : DA-002/DK/PT/02024

Pada hari ini Rabu, tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Dokumen Perjanjian Kerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2024 (selanjut)

Dimensi Berita Acara penyusunan Dokumen Perjanjian Kerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2024 dibuat dengan menggunakan dan dapat dipertanggungjawabkan sekapan atau media

Dibuat di Pangkalpinang
pada tanggal 11 November 2024



Desy Dinda,
Korbid, S.P., M.M.
Wilhelmina Ilona Masalyo,
MP 1101118 1100011018



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDE ROPHEONI, S.P., PLM
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Nelayan Pangan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberfektifan dan kejelasan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan dukungan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi ketercapaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan menandatangani dokumen yang diperlukan dalam rangka pemertoran penganggaran dan sinkron.

Pangkalpinang, 11 November 2024

PIHAK KEDUA,
PL GUBERNUR
KERULIAWAN BANGKA BELITUNG



SUGITO

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN NELAYAN PANGAN



EDE ROPHEONI, S.P., M.N.
PEMBINA UTAMA PUDAJA/C.C
NIP. 19781118 19930010005

**PERENCANAAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/ha)	4,34	Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman/hasilnya pertanian. Produktivitas pertanian dihitung berdasarkan total produksi komoditi pertanian dibagi luas lahan.
2.	Peningkatan produksi pertanian	Produk Pertanian (Ton)	20.333,00	Jumlah Produk hasil yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Hasil waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja adalah 1 (satu) tahun.
3.	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Komunitas	49,00	Nilai yang diberikan pada berbagai energi dan kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang seberapa konsumsi pangan di masyarakat.

Target kinerja tidak dapat dipisahkan antara indikator pencapaian dan capaian kinerja untuk selukannya.

Asesmen

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Kelompok
1.	Produktivitas pertanian	Program Pemukiman Dan Pengembangan Sektora Pertanian	Rp 3.315.750.000,-	APBD-P
		Program Pemukiman Dan Pengembangan Perikanan Pertanian	Rp 1.834.960.000,-	APBD-P
		Program Pemukiman Pertanian	Rp 2.290.000.000,-	APBD-P
		Program Perumahan Usaha Pertanian	Rp 122.075.750,-	APBD-P
		Program Pengembangan Dan Peningkatan Sektora Pertanian	Rp 26.148.000,-	APBD-P

2.	Produk Pertanian	Program Pengabdian Sosial dan Kesehatan Masyarakat Vokasi	Rp. 708.996.700,-	APSD-F
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.054.453.818,-	APSD-F
3.	Skor Foto Ragan Harian (FPH) Korumbi	Program Pengadaan Sumber Daya Manusia Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 0,-	APSD-F
		Program Penanganan Keamanan Pangan	Rp 167.711.300,-	APSD-F
		Program Perinkubasi Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 240.405.000,-	APSD-F
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 125.491.000,-	APSD-F
		Program Penyempit Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 30.585.490.225,-	APSD-F

Pangkasjaya, 11 November 2014

HEKKE KESMA,
PJ. DAREKUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUGITO

PEMAK PERTAMA,
KEPILAJA DEMAS PERTAMAN
DARUSALAMAN PANGAYU



ETIENNAH PRONK, S.P., M.M.
PENYUSA UTAMA MUDA/TKC
NIP. 19701116190031005

**VON DER UNIVERSITÄT WÜRZBURG
 UNIVERSITÄT WÜRZBURG INSTITUT FÜR ANATOMIE UND ZOOLOGIE
 UNIVERSITÄT WÜRZBURG**

Nr.	Name	Geburtsdatum	Geburtsort	MUTTER					Geburtsdatum Mutter	Geburtsort Mutter
				Vorname	Nachname	Str.	PLZ	Stadt		
1	Engelmann, Johannes Johannes	18.05.1900	Würzburg	Johannes	Engelmann	11	97080	Würzburg	18.05.1900	Würzburg
2	Engelmann, Johannes Johannes	18.05.1900	Würzburg	Johannes	Engelmann	11	97080	Würzburg	18.05.1900	Würzburg
3	Engelmann, Johannes Johannes	18.05.1900	Würzburg	Johannes	Engelmann	11	97080	Würzburg	18.05.1900	Würzburg



**VON DER UNIVERSITÄT WÜRZBURG
 UNIVERSITÄT WÜRZBURG INSTITUT FÜR ANATOMIE UND ZOOLOGIE
 UNIVERSITÄT WÜRZBURG**

Nr.	Name	Geburtsdatum	Geburtsort	MUTTER					Geburtsdatum Mutter	Geburtsort Mutter
				Vorname	Nachname	Str.	PLZ	Stadt		
1	Engelmann, Johannes Johannes	18.05.1900	Würzburg	Johannes	Engelmann	11	97080	Würzburg	18.05.1900	Würzburg
2	Engelmann, Johannes Johannes	18.05.1900	Würzburg	Johannes	Engelmann	11	97080	Würzburg	18.05.1900	Würzburg
3	Engelmann, Johannes Johannes	18.05.1900	Würzburg	Johannes	Engelmann	11	97080	Würzburg	18.05.1900	Würzburg





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sekeloa Timur No. 100, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 36122
Telp. (0710) 710101, 710102, 710103, 710104, 710105, 710106

Pangkalpinang, 04 April 2024

Nomor	700/SP	JL/IG/DTA/2024	Yth.	Kepala Dinas Perikanan dan
Ditir	Tobato			Ketahanan Pangan Provinsi
Lampiran	-			Kepulauan Bangka Belitung
Hal	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan			01 -
	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan			PANGKALPINANG
	Tahun 2023 pada Dinas Perikanan			
	dan Ketahanan Pangan			
	Provinsi Kepulauan Bangka			
	Belitung			

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perencanaan Anggaran Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Dukasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Nanti telah melakukan evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, dengan tujuan:
 - Mempertahankan informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - Mendaftar tingkat implementasi SAKIP;
 - Mendaftar tingkat akuntabilitas kinerja;
 - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP; dan
 - Memberikan tindakan lanjut rekomendasi hasil evaluasi secara sistematis.
- Dukasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi:
 - Perencanaan kinerja pemecahan kinerja;
 - Perilaku pengukuran kinerja;
 - Perilaku pelaksanaan kinerja;
 - Perilaku evaluasi akuntabilitas kinerja.

3. Daftar RKP Bersa dapat memberikan gambaran hasil penilaian terhadap variabel, antara lain keterlaksanaan yang ada dalam pencapaian berbagai komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja dan evaluasi keterlaksanaan. Kinerja manual sebagai objek/standar yang diwujudkan kinerja yang mengimplementasikan RKP.

Berbagai-komponen tersebut kemudian ditunjukkan dalam bentuk Rangkai Faktori (RF), sesuai dengan uraian sebagai berikut:

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan Kinerja, Penilaian Kinerja dan Evaluasi Keterlaksanaan Kinerja Internal.

b. Sub-komponen

Diuraikan dengan gradasi ketuntasan, kualitas, dan kuantitas pada setiap komponen.

c. Nilai

Mempunyai gradasi penilaian yang yaitu diuraikan di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai secara kuantitatif berdasar skala standar dan dapat diuraikan ke dalam RFK.

No.	Komponen Yang Dievaluasi	Detail	Nilai	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	31	24,00	71,30
2.	Pelaksanaan Kinerja	30	24,00	72,76
3.	Penilaian Kinerja	15	12,00	37,46
4.	Evaluasi Keterlaksanaan Kinerja Internal	22	22,00	30,90
	Nilai Rata-Rata	88	72,00	70,22
	Tingkat Keterlaksanaan Kinerja	88	88	88

4. Urutan hasil penilaian dan rating masing-masing komponen manajemen kinerja sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Kualitas perencanaan kinerja yang adalah yang akan dicapai untuk menunjukkan hasil yang berkembang, hasil evaluasi dan laporan "Perencanaan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar 23,88 dengan urutan penilaian sebagai berikut:

1) Indikator Perencanaan Kinerja Telah Tersedia

Hasil analisis dan sub-komponen ini menunjukkan nilai sebesar 4,80.

Penilaian dilakukan oleh beberapa dokumen perencanaan kinerja dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak dapat karena tidak ada perencanaan energi.
- b) Tidak dapat karena perencanaan energi jangka pendek.
- c) Tidak dapat karena perencanaan energi jangka menengah.
- d) Tidak dapat karena perencanaan energi jangka pendek.
- e) Tidak dapat karena perencanaan aktivitas yang tidak mengaitkan energi.
- f) Tidak dapat karena perencanaan anggaran yang tidak mengaitkan energi.

Kesimpulan: bahwa dokumen perencanaan energi tidak berbeda.

- 2) Dokumen Perencanaan energi memiliki standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan pembelajaran (cascading) di tingkat level secara logis, serta memperlebar kinerja bidang lain (crosscutting).

Hasil evaluasi atas 100 korporasi ini menunjukkan nilai sebesar 6,38.

Penilaian dilakukan atas realitas dokumen perencanaan energi dengan kriteria antara lain:

- a) Dokumen Perencanaan energi telah diterbitkan.
- b) Dokumen Perencanaan energi telah dipublikasikan melalui Web Korporasi, selain melalui web dinas.
- c) Dokumen Perencanaan Kerja tidak menggunakan bahasa teknis atau bahasa sektoral yang perlu dijabar.
- d) Masih terdapat masalah program yang utama ataupun yang terdistribusi dan berorientasi secara portofolio dan terdapat program berbeda tetapi memiliki ukuran kinerja yang sama.
- e) Masih terdapat indikator kinerja yang tidak SMART, hanya bersifat output saja, terdistribusi dokumen dan masih bersifat paper.
- f) Tidak terdapat target kinerja dalam waktu dan target program masih berupa output.
- g) Masih terdapat dokumen perencanaan energi yang belum selaras/koordinatif level jabatan.
- h) Selain Rencana Perencanaan Kerja menggunakan bahasa yang teknis/teknologis, serta selaras antara Korporasi/Hasil yang akan dicapai dengan level jabatan (Cascading).
- i) Perencanaan energi dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/bidang. Luas Cakupan lain yang berkaitan (Crosscutting).
- j) Selain pejabat memfasilitasi dan mengaitkan Perencanaan kerja.

terutama dalam daerah perikanan yang akan semakin mencapai standar yang baik dan tinggi yang SWRI.

3) Perencanaan Energi telah dimanfaatkan untuk menajudikan hasil yang berkelanjutan.

Hasil analisis atas 50 konsep ini menunjukkan nilai skor 18,59.

Realitas di lokasi atas ketersediaan dalam perencanaan energi dengan biaya rendah yaitu:

- a) Anggaran yang dibayarkan telah mengacu pada biaya yang Rp10.000/1
- b) Model yang dikembangkan lebih mendukung kinerja yang lebih efisien.
- c) Data lengkap kinerja belum tersedia.
- d) Karena di lokasi dapat berjalan dalam bentuk operasi yang sudah dioperasikan.
- e) Selain sebagai pembelanja/pengembangan Dokumen Perencanaan Energi yang dibayarkan dan hasil analisis mengenai kinerja sebelumnya.
- f) Selain sebagai pelaksanaan/penyusunan Dokumen Perencanaan Energi dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik.
- g) Setiap analisis yang membandingkan pada, serta keterbatasan data mengenai kinerja yang lebih dibayarkan.
- h) Setiap operasi pemeliharaan dan audit telah dilaksanakan dalam mencapai kinerja yang lebih dibayarkan.

Konsep bahwa perencanaan energi telah seperti karakteristik untuk mewujudkan kinerja yang lebih berkelanjutan.

B. Pengukuran Kinerja

Tingkatannya kinerja berbagai dan berkeadilan yang lebih terjadi beberapa dalam perencanaan strategi dalam mencapai energi. Hasil analisis atas gambaran "Pengukuran Kinerja" ini menunjukkan nilai sebesar 20,78 dengan aspek sebagai berikut:

1) Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan.

Hasil analisis atas 50 konsep ini menunjukkan nilai skor 5,46.

Realitas di lokasi atas ketersediaan pemantauan/pengukuran kinerja dengan biaya rendah yaitu:

- a) Terdapat sistem pemantauan kinerja dan pengukuran data kinerja.
- b) Terdapat Data/Updatasi yang jelas atas kinerja dan data sebagai indikator kinerja.

- c) Terdapat metode yang bisa tetapi pengujian data kinerja yang dapat dilakukan.

Kendaraan tenaga dikawat pengujian kinerja akan kembali.

- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisiensi telah dilakukan secara berjangka dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi atas sub organisasi ini menunjukkan nilai sebesar 6,28.

Perbaikan dilakukan oleh elemen pokoknya pengukuran kinerja dengan kriteria antara lain:

- Pengukuran kerja telah sebagai pengantar perubahan (Growth Model) dalam memutar operasi kerja.
- Unit Kerja yang diimplementasi telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- Dalam menyajikan data secara sederhana tidak dapat dipertanyakan.
- Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.
- Selanjut ini diperlukan instrumen pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjangka.
- Pengukuran data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Internet (Aplikasi).

Kesimpulan bahwa Pengukuran Kinerja dalam operasionalnya menjadi kebutuhan dalam kerja secara efektif dan efisien secara berjangka dan berkelanjutan.

- 2) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam penentuan Rencana dan Prioritasnya serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Hasil evaluasi atas sub organisasi ini menunjukkan nilai sebesar 12,00 dengan nilai sebagai berikut:

- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan (ambisi/pengembangan) kebijakan dan pengembangannya.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan/pengembangan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi.
- Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan (anggaran) organisasi.
- Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan strategi dalam mencapai kinerja.
- Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan kebijakan dalam mencapai kinerja.

- f) Pegawai Kerja telah mengimplementasi perubahan struktur dalam mencapai Kinerja
- g) Pegawai Kerja telah mengimplementasi perubahan Anggaran dalam mencapai Kinerja
- h) Dalam melaksanakan program-program dalam mencapai Kinerja
- i) Setiap aktivitas yang telah dilaksanakan telah memiliki pedoman atau hasil yang dapat diukur
- j) Setiap pegawai telah sepenuhnya memahami dan peduli terhadap pencapaian Kinerja

Respon ini dari Pegawai Kerja akan digunakan sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyusunan strategi dalam mencapai Kinerja yang lebih dan efisien.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja yang menggunakan kualitas atau pencapaian Kerja, baik kuantitatif/kuagualita Kinerja serta aspek perilaku/kepercayaan yang memberikan dampak besar dalam pencapaian hasil/kegiatan dalam mencapai Kinerja terikutnya. Hasil tersebut atas laporan "Pelaporan Kinerja" tersebut akan di nilai sebesar 22-40 sesuai dengan tabel berikut.

1) Terlepas Dikawatir Laporan yang menggambarkan Kinerja

Hasil tersebut atas satu komponen ini memiliki bobot nilai sebesar 2,40 dengan aspek sebagai berikut:

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah dibuat.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah dibuat secara rutin.
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah dikomunikasikan.
- d) Dokumen Laporan Kinerja benar-benar diukur.
- e) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
- f) Dokumen Laporan Kinerja telah dipaparkan tepat waktu.

Dengan tolak kemampuan lain dari Dokumen Laporan Kinerja belum diukur.

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggunakan Kualitas atau Pencapaian Kinerja, Informasi kuantitatif/kuagualita Kinerja serta upaya perilaku yang pencapaian kerjanya.

Hasil tersebut atas satu komponen ini memiliki bobot nilai sebesar 4,00 dengan aspek sebagai berikut:

- a) Dokumen Laporan Kinerja dibuat secara berkala/teratur dengan rutin.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

- a) Dokumen Laporan Kinerja lebih mengutamakan pertanggung jawaban kinerja dengan target tahunan.
- b) Dokumen Laporan Kinerja lebih mengutamakan pertanggung jawaban kinerja dengan target jangka menengah.
- c) Dokumen Laporan Kinerja lebih mengutamakan pertanggung jawaban kinerja dengan realisasi kinerja tahunan sebelumnya.
- d) Dokumen Laporan Kinerja lebih mengutamakan pertanggung jawaban kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/intermedial (Perwakilan Kinerja).
- e) Dokumen Laporan Kinerja lebih mengutamakan kualitas atau capaian kinerja karena upaya nyata dan job cost effectiveness.
- f) Dokumen Laporan Kinerja lebih mengutamakan efisiensi atau penghematan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- g) Dokumen Laporan Kinerja lebih mengutamakan upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (Belanja untuk perbaikan kinerja).

Ketepatan dalam dokumen laporan kinerja akan sangat sangat menentukan direvisi atau tidak.

- 3) **Pelaporan Kinerja** telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Hasil evaluasi ke subkomponen ini menunjukkan ada sekitar 6,48 dengan opsi strategi berikut:

- a) Informasi dalam laporan kinerja sudah menjadi parameter utama (strategic performance level).
- b) Penyajian informasi dalam laporan kinerja sangat berkualitas dan akurat.
- c) Informasi dalam laporan kinerja sudah lebih digunakan dalam penyusunan aktivitas untuk mencapai kinerja.
- d) Informasi dalam laporan kinerja sudah lebih digunakan dalam penyusunan anggaran kegiatan untuk mencapai kinerja.
- e) Informasi dalam laporan kinerja lebih digunakan dalam evaluasi pencapaian sebelumnya (kinerja).
- f) Informasi dalam laporan kinerja lebih digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan diadopsi berikutnya.
- g) Informasi dalam laporan kinerja sudah mempengaruhi perubahan kinerja organisasi.
- h) Kepala Pelaporan Kinerja sudah lebih melakukan pertemuan terhadap staf di bawah LKCP/Penyaji Data, sehingga dokumen LKCP lebih efektif dalam mengontrol kinerja.

Ketepatan dalam Pelaporan Kinerja akan memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Detail akuntabilitas kinerja internal yang merupakan kuantitatif (dapat) atau pengumpulan informasi SPKP atau indikator dan ukuran lainnya. Hasil evaluasi atau laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar 20,00 dengan uraian sebagai berikut:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi atau sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar 4,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Terdapat dokumen terkait Dokumen AKP Internal.
- Beberapa AKP Internal telah di akurasi pada tahun unit kerja/prangkat dasar.
- Beberapa akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara menyeluruh.

Dengan nilai koefisien nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ini di standar.

2) Dokumen Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala/bersama dengan Sumber Daya yang memadai.

Hasil evaluasi atau sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar 8,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Beberapa AKP Internal telah dilaksanakan secara berkala.
- Beberapa AKP Internal telah dilaksanakan oleh SDP yang memadai.
- Beberapa AKP Internal telah dilaksanakan dengan pelaksanaan yang memadai.
- Beberapa AKP Internal telah dilaksanakan pada tahun unit kerja/prangkat dasar.
- Beberapa AKP Internal telah dilaksanakan sepenuhnya menggunakan Teknologi Informasi (A/B/C).

Selanjutnya bahwa beberapa Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

3) Implementasi GAKP telah meningkatkan kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dapat) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.

Hasil evaluasi atau sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar 10,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Seluruh rekomendasi atau hasil evaluasi AKP Internal dapat diadanya.

- e) Tindak lanjut penguatan implementasi SAPK dengan melaksanakan tindak lanjut atau rekomendasi hasil evaluasi ACP Internal.
- f) Hasil evaluasi ACP Internal akan diupload ke link website dan pengumuman di media sosial.
- g) Hasil evaluasi ACP Internal akan diupload ke link website dan diinformasikan ke media sosial.
- h) Tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi ACP Internal.
- i) Guna Berwujud Daerah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindakan dan tindak lanjut evaluasi internal untuk workdays.

Kesepuluh (10) Subseksi merekomendasikan hasil evaluasi ACP Internal akan dilaksanakan.

3. Rekomendasi

Terdapat permasalahan yang akan dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh jajarannya agar ditinjau kembali sebagai berikut:

- a. Melakukan Dukungan Peningkatan dan pengawasan dalam website Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Menopongkan kegiatan sosial – program dalam lingkungan pemerintahan.
- c. Menunjang indikator kinerja yang belum SMART.
- d. Menyajikan dan literasi yang berkembang kepada publik.
- e. Menindaklanjuti rekomendasi bahan sebelumnya dan tahunan.
- f. Untuk meningkatkan Revisi Laporan Kinerja Tahun 2023.
- g. Untuk membuat Applied Eviden ACP.

Dengan demikian, hasil evaluasi akan dilaksanakan sesuai dengan Arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas beserta seluruh jajaran dalam menanggapi tanggapan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih atas perhatian dan binaannya Gubernur.

DIREKTOR
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITONG, 5
 Gedung Kantor Gubernur

11/04/2023

Perdana/Utami Nurya
 NIP. 196308-01100001-001

Lampiran 4. Sesi Pameran Penghargaan Siswa Peringkat Daerah Tahun 2024





DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG